



**KAPUAS HULU!**  
**SEMAKIN HEBAT!**

# RENCANA KINERJA PERANGKAT DAERAH **RENJA 2025**

**DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KAPUAS HULU**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Walaupun masih dirasa kurang dan jauh dari kesempurnaan, akan tetapi ini sebagai langkah awal dan momentum untuk menuju transparansi dan akuntabilitas laporan ini.

Rencana Kerja ini disusun sebagai bahan yang akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu serta pertanggungjawaban awal pelaksanaan Tugas, Pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sekaligus sebagai umpan balik (Feedback) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Akhir kata, semoga Rencana kerja (Renja) ini dapat digunakan bagi pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta dapat memenuhi harapan masyarakat sesuai rencana kerja yang telah disusun.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Kapuas Hulu,



H. SUPARSO, S.Pd,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700505 199101 1 001

## DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
2.2 Analisis Kienrja Perangkat Daerah.....	38
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	57
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	60
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	102
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	125
3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah.....	127
3.3 Program dan Kegiatan.....	130
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....</b>	<b>188</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>189</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	<i>halaman</i>
2.1. Pelaksanaan Renja Kesehatan Tahun 2024.....	9
2.2. Pencapaian Kinerja.....	38
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	61
2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	103
3.1. Tujuan dan sasaran.....	129
3.2. Indikatif pendanaan program dan kegiatan.....	143



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	<i>halaman</i>
3.1. Crosscutting Indeks Balita Stunting.....	133
3.2 Crosscutting Indeks Kepuasan Masyarakat.....	142

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan dilakukan dengan pendekatan Program Indonesia Sehat.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional. Pilar Paradigma Sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Sementara itu Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh keberlanjutan-kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Sebagai tindak lanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam prosesnya berpedoman pada Renstra dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perangkat Daerah. Selain itu melakukan pengkajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Selanjutnya dilakukan perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah adalah pengesahan Renja oleh Kepala Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Renja Perangkat Daerah menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu. Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu juga memuat usulan dari hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Program dan kegiatan yang memuat indikator, tolak ukur dan target kinerja mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). program dan kegiatan Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program SKPD lainnya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.
7. Untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTU**



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Anggaran Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Belanja APBD sebesar Rp. 268.565.639.361,00 dan APBD (perubahan) sebesar Rp. 269.963.844.948 yang terdiri dari 8 program dan 30 kegiatan dan 120 sub kegiatan. Jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 264.837.385.620 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98 %

Tabel evaluasi pelaksanaan Renja Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcomes</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-3) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s / d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase penyusunan dokumen-dokumen SAKIP tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%		100,00%
		- Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
		Persentase target kinerja yang di evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	3	100%	3		100%
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	2	100%	2		2
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	3	3	3	100%	3		3
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	2	2	100%	2		2

	Perubahan DPA-SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
<b>1.02.01.2.01.06</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	6		100%	6		6
<b>1.02.01.2.01.07</b>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	100%	3		3
<b>1.02.01.2.02</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00%
<b>1.02.01.2.02.01</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	925 Orang		884 orang					100%
<b>1.02.01.2.02.03</b>	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	100%	1		1
<b>1.02.01.2.02.04</b>	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9	9	9	9	100%	9		9
<b>1.02.01.2.02.05</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun	1	1	1	1	100%	1		1
<b>1.02.01.2.02.06</b>	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1	1	100%	1		1
<b>1.02.01.2.02.07</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	14	14	14	14	100%	14		14

	Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00%
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100%	1		1
1.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100%	1		1
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	7	7	7	100%	7		7
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00%
1.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi	26	26	26	26	100%	26		26
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00%
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	1	1	100%	1		1
1.02.01.2.05.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	1	1	100%	1		1



<b>1.02.01.2.06</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00%
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1		1
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2		2
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2		2
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	3	3	100%	3		3
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1		1
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	1	1	100%	1		1
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	2	2	100%	2		2
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	100%	1		1
<b>1.02.01.2.07</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00%
<b>1.02.01.2.07.06</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	10	10	10	100%	10		10

1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00%
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	2	2	100%	2		2
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3	100%	3		3
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	100%	3		3
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00%
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	30	30	30	100%	30		30
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	200	200	200	100%	200		200
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	'Persentase tersedianya barang dan jasa sesuai kebutuhan								

1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	1	100%	1		1
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Kabupaten</b>	<b>85%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>		<b>80%</b>	<b>80%</b>
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alkes >60%	95%	95%	90%	90%	100%		90%	90%
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3	3	3	3	100%	3		3
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar								
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2	2	2	2	100	2		2
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh	4	4	4	4	100%	4	4	4

		Fasilitas Kesehatan Lainnya								
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	4	4	4	4	100%	4	4	4
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3	3	3	3	100%	3		3
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15	13	13	13	100%	13		13
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	454	455	455	455	100%	455		455
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	190	185	185	185	100%	185		185
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	9	5	5	5	100%	5		5
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	9	5	5	5	100%	5		5
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) , Makanan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang	250	250	250	250	100%	250	250	250



	dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya								
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00%
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5222	4737	4737	4737	100%	4737		4737
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4985	4521	4521	4521	100%	4521		4521
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4676	4241	4241	4241	100%	4241		4241
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21303	20288	19322	19322	100%	19322		19322
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51070	46322	46322	46322	100%	46322		46322
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130.000	120.500	128000	128000	100%	128000		128000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.591	21.398	21398	21398	100%	21398		21398
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.150	3100	3100	3100	100%	3100		93100

	Melitus									
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	616	586	586	586	100%	586		586
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3247	3342	3342	3342	100%	3342		3342
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	23	23	23	23	100%	23		23
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	12	12	12	100%	12		12
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5	5	5	5	100%	5		5
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8	8	8	8	100%	8	8	8
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	23	23	23	23	100%	23		23
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23	23	23	23	100%	23		23
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23	23	23	23	100%	23		23

1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23	23	23	23	100%	23		23
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan								
1.02.01.24.022	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	23	23	23	23	100%	23		23
1.02.01.24.029	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	23	23	23	23	100%	23		23
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	13	13	13	13	100%	13		13
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3	3	3	3	100%	3		3
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	23	23	23	23	100%	23		23
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	26	26	26	26	100%	26		26
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	23	23	23	23	100%	23		23

	Massal)									
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	23	23	23	23	100%	23		23
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi satu data kesehatan	1	1	1	1	100%	1		1
1.02.02.2.03	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	27	27	27	27	100%	27		27
1.02.02.2.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	1	1	100%	1		1
1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	1	1	1	100%	1		1
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ceklist Pelaksanaan Program 80% Benar	100%	100%	100%	86,90%	86,90%	100%		86,90%
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan	Jumlah Dokumen Hasil								

	Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)								
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya barang dan jasa sesuai kebutuhan	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200							
1.02.04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>		<b>80%</b>
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%

1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20	20	20	20	100%	20		20
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	20	20	18	18	100%	20		20
1.02.04.2.03.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	200	160	160	160	100%	160		160

	Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rumah Tangga								
1.02.04.2.04.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan sertifikatnya	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	30	30	30	30	100%	30		30
1.02.04.2.06.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa dan ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	100%	70%		70%
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30	20	20	20	100%	20		20



	Tindak Lanjut Pengawasan									
1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Kecamatan dengan Rumah Tangga ber PHBS <math>\geq</math> 50 %</b>	<b>60%</b>	<b>55%</b>	<b>55%</b>	<b>55%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24	20	20	20	100%	20		20
2.14.02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Kelahiran per Fertility Rate/ASFR 15-19)</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>		<b>50%</b>
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kabupaten								
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	10	8	8	8	100%	8		8

2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	3	3	3	3	100%	3		3
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3	3	3	3	100%	3		3
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)</b>	<b>84%</b>	<b>82,21</b>	<b>82,21</b>	<b>82,21</b>	<b>100%</b>	<b>82,21</b>		<b>82,21</b>
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2	2	2	2	100%	2		2
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	23	23	23	23	100%	23		23
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	1	1	1	1	100%	1		1

	Elektronik Serta Media Luar Ruang	dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang								
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	23	23	23	23	100%	23		23
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	23	23	23	23	100%	23		23
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK									
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Kecamatan yang memiliki tenaga PKB dan PLKB minimal 1	15	15	15	15	100%	15		15
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	23	23	23	23	100%	23		23
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	564	564	564	564	100%	564		564

2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang mendapat distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28	28	28	28	100%	28	28
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	481	437	437	437	100%	437	437
2.14.03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembina	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	20%						
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	39	39	39	39	100%	39	39

2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	8	8	8	8	100%	8		8
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Cakupan pengembangan pelayanan informasi dan konseling PIKR, BKR, BKL dan UPPKS/ UPPKA</b>	<b>15%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>		<b>10%</b>
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang dilakukan Pembinaan dan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga	50%	50%	50%	50%	100%	50%		50%
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80	75	75	75	100%	75		75

Dari tabel 2.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Program ini terdiri dari 2 yaitu Persentase Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP dan RB telah memenuhi target dengan capaian 100% dan Persentase Temuan BPK yang dtindaklanjuti target 100% realisasi sebesar 100%. Program ini terdiri dari 9 Kegiatan dari 33 Sub Kegiatan.

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Capaian Indikator Program ini :

- a. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar target 100% dengan realisasi 60,99%
- b. Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar target 100% dengan realisasi 72,1%
- c. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar target 100% dengan realisasi 80,7%
- d. Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar target 100% dengan realisasi 64,9%
- e. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar target 100% dengan realisasi 92,7%
- f. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar target 100% dengan realisasi 80,6%
- g. Persentase Underweight Balita target 25,70% dengan realisasi 24,14%
- h. Prevalensi Wasting Pada Balita target 12% realisasi 9,27%
- i. Persentase desa yang melaksanakan STBM target 100% dengan realisasi 100%

- j. Persentase penderita terduga TB Paru yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar Persentase orang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar target 100% dengan realisasi 100%
- k. Kejadian Luar Biasa target  $\leq 1$  kasus dengan realisasi 1 kasus
- l. Persentase penduduk usia 15 s.d 59 tahun yang mendapatkan screening kesehatan sesuai standar target 100% dengan realisasi target 100% dengan realisasi 98%
- m. Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar target 100% dengan realisasi 81,4%
- n. Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar target 100% dengan realisasi 100%
- o. Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar target 100% dengan realisasi 100 %
- p. Persentase Puskesmas dengan IDL 80% target 100 % realisasi 38,4%
- q. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Kabupaten target 1,21
- r. Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi target 100% realisasi 100%
- s. Persentase Puskesmas yang terakreditasi target 100% realisasi 100%
- t. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial target 95 %realisasi 100%
- u. Persentase Puskesmas sesuai standar target 70% realisasi 70%
- v. Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan target 85% realisasi 78,26%

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 48 sub kegiatan



Faktor yang mempengaruhi pencapaian target tidak tercapai pada Program dan Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Pembinaan kader oleh petugas masih kurang
- Belum ada penambahan tenaga gizi untuk Puskesmas
- Kurangnya pengelolaan manajemen motivasi tenaga kesehatan
- Kurangnya pendampingan konseling dari petugas gizi
- Alokasi dana untuk tiap program di Puskesmas belum berdasarkan prioritas masalah
- Pelatihan berkaitan dengan peningkatan kapasitas petugas dalam melakukan penyuluhan kurang
- Konseling menyusui belum melibatkan anggota keluarga (suami, nenek atau mertua)
- Petugas gizi kurang mampu dalam melakukan Advokasi
- Lemahnya pemanfaatan buku KIA oleh masyarakat terutama sebagai panduan untuk kesehatan ibu dan bayi.
- Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum sesuai standar diantaranya karena rendahnya kepatuhan petugas dalam pencatatan dan pelaporan terutama untuk pelayanan yang dilakukan di luar institusi pemerintah, misalnya pencatatan dan pelaporan di praktek swasta belum sesuai ketentuan.
- Lemahnya pengawasan penggunaan alat kontrasepsi terutama kontrasepsi pil dan suntikan, dimana banyak ditemukan akseptor yang menggunakan kontrasepsi pil dan suntikan tidak terdata di kohort Keluarga Berencana yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, dikarenakan pil dan suntikan bisa dibeli bebas di Apotek.
- Kurangnya kepatuhan petugas dalam menjalankan pelayanan sesuai pedoman/SOP.
- Koordinasi lintas program dan lintas sektoral yang belum harmonis, tampak pada pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), seperti P4K

masih menjadi tugas tenaga kesehatan (bidan) saja, dimana masih 1 dari 5 desa belum melaksanakan P4K.

- Belum meratanya distribusi dan kualitas SDM tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang bertugas di daerah daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, sehingga belum semua nakes dapat memberikan pelayanan sesuai standar.
- Tenaga bidan di puskesmas lebih banyak dilibatkan dengan pekerjaan dan tanggung jawab diluar program (merangkap menjadi pengelola keuangan)
- Kondisi geografis dan demografis yang menyebabkan kesulitan ibu untuk menjangkau akses pelayanan kesehatan sesuai standar.
- Masih banyak pertolongan persalinan oleh nakes tetapi dilakukan di non fasyankes (rumah), hal tersebut terkait dengan masih terbatasnya jumlah dan persebaran fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar sebagai tempat pertolongan persalinan.
- Peran serta keluarga dan masyarakat dalam mendampingi ibu hamil yang masih rendah, masalahnya adalah dimana ibu hamil mengunjungi kelas ibu tanpa didampingi keluarga atau suami dengan alasan keluarga atau suami sibuk bekerja Ibu hamil baru bisa dilaporkan mengikuti kelas ibu hamil sesuai standar adalah ibu mengikuti kelas ibu minimal 4 kali dan 1 kali diantaranya didampingi keluarga atau suami.
- monev sudah mencapai target dengan 23 puskesmas, namun berdasarkan hasil tilik yang dilakukan ditemukan bahwa adanya pergantian petugas sanitarian, tidak adanya pelimpahan tugas dari petugas lama ke petugas baru, kurangnya pengetahuan petugas tentang pengisian form laporan kesling, ketidakpatuhan petugas kesling dalam pelaporan kesling, petugas kesling dibebankan tugas rangkap

- Kurangnya pengetahuan petugas kesling dalam melakukan pengawasan terhadap TFU dan TPM, Kurangnya pembinaan petugas terhadap pengelola TFU dan TPM, ketidakpatuhan petugas kesling puskesmas dalam pelaporan triwulan, belum tersedianya peralatan sanitarian kit di setiap puskesmas
- Rendahnya penemuan kasus aktif di desa-desa
- Jangkauan/ penyebaran pemukiman Penderita TB yang tidak merata
- kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan lanjutan, dan ketuntasan minum obat
- Beberapa puskesmas yang pencapaiannya rendah karena tidak melakukan sweeping
- RDT HIV terbatas
- Kegiatan PTM belum terintegrasi
- Beberapa obat dibutuhkan tetapi tidak tersedia di Fasilitas Kesehatan
- Sarana dan Prasarana di Instalasi farmasi dan di Puskesmas belum maksimal
- Pencatatan stok obat dan pengelolaan obat yang masih belum optimal
- Petugas kefarmasian di Puskesmas kurang optimal dalam pengelolaan obat publik dan pelayanan kefarmasian lainnya
- Baru 17 Puskesmas dari 23 Puskesmas yang telah memenuhi standar Permenkes 43 tahun 2019
- Prasarana dan alat kesehatan yang masih minim
- Jaringan Puskesmas yang belum merata disetiap Desa
- Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau.
- Sarana Prasarana Rumah Sakit yang belum memenuhi standar

Rencana tindak lanjut pada program ini adalah sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan secara berkala, melakukan orientasi uraian tugas pokok tenaga sanitarian, melakukan usulan laptop ke bagian pengadaan dinas kesehatan, melakukan program terintegrasi
- Melakukan pembinaan terhadap petugas, melakukan pembinaan terhadap pengelola TTU dan TPM, melakukan usulan anggaran perubahan terkait perjadiin IKL TTU dan TPM sehingga mencapai target
- Melakukan orientasi petugas terhadap uraian tugas, melakukan koordinasi dengan pihak desa
- Melakukan orientasi STBM terpadu, melakukan pendampingan pemicuan dan pasca pemicuan, melakukan orientasi terhadap petugas yang diberikan tugas sebagai sanitarian di puskesmas, melakukan updating data STBM melalui e-monev STBM, melakukan koordinasi dengan pihak desa
- Meningkatkan intensitas penemuan aktif dan penyembuhan pasien
- Meningkatkan Kontak tracing untuk mencegah penularan dengan memeriksakan seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah
- Pelaksanaan sweeping dilaksanakan oleh tenaga kesehatan terhadap sasaran yang tidak terjangkau secara pasif di fasilitas pelayanan Kesehatan
- Pengajuan permohonan RDT
- Untuk mengatasi kekosongan obat dan kebutuhan rutin obat dan BMHP diperlukan pengadaan obat untuk tahun berikutnya. Obat yang diadakan kemudian di distribusikan ke Puskesmas. Puskesmas membuat RKO Tahunan dan Rencana Permintaan obat tiap 3 bulan ke Instalasi Farmasi
- Mengajukan sarana dan prasarana berupa AC, Kulkas vaksin dan teralis sebagai sarana pengaman di Instalasi Farmasi

- Pertemuan E logistik lebih komprehensif. Dalam pertemuan tersebut memastikan bahwa pengelola obat selalu mencatat stok obat dan stok opname setiap bulan. Saat pertemuan konfirmasi meminta petugas menghitung, mengentry data dan kemudian mencocokkan kartu stok 31 des yang sudah diverifikasi. Pada saat konfirmasi data petugas membawa kartu stok masing masing obat di Puskesmas.

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

- Melakukan pendataan penduduk sasaran yang terintegrasi dengan kegiatan PIS-PK.
- Melakukan sosialisasi indikator kinerja, definisi operasional, dan pemanfaatan Buku KIA ke Puskesmas, jaringan dan jejaring.
- Melakukan monitoring evaluasi dan bimbingan teknis secara berkala ke puskesmas, jaringan dan jejaring.
- Refresing petugas kesehatan yang bertugas di puskesmas maupun jejaring terhadap pedoman Kesehatan Ibu dan Anak.
- Memperkuat peran tokoh agama dan tokoh masyarakat agar ibu hamil dan keluarga dapat memanfaatkan Buku KIA sesuai dengan kegunaannya.
- Memperkuat peran keluarga dan suami dalam pendampingan ibu selama masa kehamilan sampai persalinan dan nifas.
- Memprioritaskan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung untuk persalinan fasilitas yang sesuai standart.
- Melakukan sosialisasi pemanfaatan program Jaminan Persalinan termasuk pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), sebagai alternatif pemecahan masalah kesulitan geografis.
- Melakukan koordinasi lintas sektoral sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain pelatihan kader pendamping ibu hamil, penyelenggaraan dan pengelolaan balai persalinan desa, penyelenggaraan posyandu lansia dan kegiatan home care untuk lansia risiko tinggi.

### 3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Capaian indikator Program ini adalah :

- a. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik target 100% realisasi 100%
- b. Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar target 80,7% realisasi 30%
- c. Persentase RS Rujukan Kabupaten yang memiliki 4 dokter spesialis dasar (wajib ada) dan 3 dokter spesialis lainnya target 100% realisasi 33%
- d. Jumlah Puskesmas tanpa dokter target 0 realisasi 1

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan

Faktor yang mempengaruhi capaian pada program ini adalah :

- Tenaga kesehatan yang ada masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan
- Beberapa Fasilitas Kesehatan yang belum memiliki tenaga sesuai kompetensi.

Rencana tindak lanjut program ini adalah :

- Pemerataan dan pemenuhan Petugas Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
- Mengoptimalkan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Petugas kesehatan sesuai standar

### 4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Indikator Program ini adalah

- a. Persentase pemberian rekomendasi izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) target 100% dengan realisasi 100%
- b. Persentase rekomendasi pemberian izin produksi pangan industri rumah tangga target 100% dengan realisasi 100%
- c. Persentase pembinaan dan pengawasan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman industri rumah tangga target 100% dengan realisasi 100%

Program ini terdiri dari 4 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan  
Indikator sub kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :  
Faktor yang mempengaruhi capaian pada program ini adalah :

- Banyak Pemilik IRTP dan Apotek yang belum mengajukan perizinan

Rencana tindaklanjut dalam program ini adalah sebagai berikut :

- Advokasi ke Dinas Perindustrian tentang keluhan Pemilik usaha kecil IRTP terkait pemenuhan komitmen izin usaha. Sosialisasi ke Pemilik IRTP tentang Penyuluhan Keamanan Pangan mencakup dalam kota dan luar kota. Koordinasi dengan Forclime tentang rumah Tangga yang mempunyai usaha makanan. Membuat Jadwal Penyuluhan Keamanan Pangan dan kemudian dipublikasikan di media (radio, medsos, fb dll)

#### 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator program ini adalah Persentase Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat target 50% dengan realisasi 18,53%.

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 subkegiatan.

Untuk program ini secara target dan realisasi tercapai artinya tidak ada kendala yang berarti dalam menjalankan program.

Rencana tindaklanjut pada program ini adalah :

- a. Melakukan pendekatan lintas sektoral secara berkala
- b. Melakukan Monitoring serta Evaluasi Kepada Petugas Kesehatan di Puskesmas
- c. Melakukan Pembinaan serta pendekatan Persuasif kepada Petugas
- d. Melakukan bimbingan teknis

Rencana Tindak lanjut pada program ini adalah :

- a. Merencanakan kegiatan pembinaan kader Posyandu secara continue;



- b. Mengusulkan penambahan tenaga gizi untuk Puskesmas
- c. Membuat evaluasi hasil pembinaan terhadap kader
- d. Membuat jadwal rencana penyuluhan gizi dalam setahun
- e. melakukan evaluasi setiap bulan pada indikator yang belum tercapai
- f. melakukan pemantauan perencanaan penganggaran
- g. melakukan pendampingan advokasi kembali kepada petugas gizi sampai mampu melakukan advokasi tanpa pendampingan
- h. pertemuan petugas promosi kesehatan untuk orientasi petugas yang baru, dan menjelaskan indikator kinerja yang baru
- i. Kesepakatan bersama untuk menetapkan standar dan komitmen pelaporan kegiatan

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

- a. Koordinasi dengan FKTP untuk melakukan advokasi kepada pihak lintas sektoral untuk mendukung kebijakan dan operasional pelaksanaan Posyandu, SMD, MMD, dan Desa Siaga
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis langsung terkait kompetensi petugas PKPM.
- c. Koordinasi dengan FKTP untuk Refresing kader kesehatan untuk peningkatan kompetensi kader.
- d. Inventarisir jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas melalui pelaporan ke Dinas Kesehatan.
- e. Melakukan Pembinaan serta pendekatan Persuasif kepada Petugas

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu .

- 1. Terpenuhinya kelengkapan dokumen SAKIP
- 2. Meningkatnya Kinerja Sistem Keuangan
- 3. Terbayarnya klaim pelayanan kesehatan

4. Meningkatnya Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Kabupaten
5. Meningkatnya Akreditasi RS
6. Meningkatnya Akreditasi Puskesmas
7. Tersedianya obat esensial
8. Meningkatnya Puskesmas sesuai standar
9. Meningkatnya penerapan Jaminan Kesehatan Nasional
10. Meningkatnya tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik
11. Meningkatnya Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar
12. Meningkatnya RS Rujukan Kabupaten yang memiliki 4 dokter spesialis dasar (wajib ada) dan 3 dokter spesialis lainnya
13. Meningkatnya Puskesmas tanpa dokter
14. Meningkatnya sediaan obat yang memenuhi syarat
15. Meningkatnya sediaan makanan yang memenuhi syarat
16. Meningkatnya toko, sarana prasarana kesehatan yang berizin
17. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin
18. Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir, balita, dan anak usia pendidikan dasar
19. Meningkatnya pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas
20. Menurunnya presentase balita kurus (wasting) dan balita gizi kurang (underweight)
21. Meningkatnya Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
22. Meningkatnya desa yang melaksanakan STBM
23. Terselenggaranya Program Keluarga Berencana
24. Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
25. Menurunnya angka kelahiran remaja
26. Meningkatkan pelayanan skrining kesehatan orang usia 15 - 59 tahun
27. Meningkatkan pelayanan penderita Diabetes Melitus
28. Meningkatkan pelayanan penderita Hipertensi
29. Meningkatkan pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
30. Meningkatkan pelayanan orang terduga TBC
31. Meningkatkan pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV
32. Meningkatkan IDL
33. Menurunkan KLB

34. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
35. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49
36. PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
37. Meningkatnya Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
38. Pelaksanaan melalui Kampung KB dan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2  
Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan dasar			74%	82%	83%	84%	77,69	81,83	83,61			
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan rujukan			73%	75%	76%	77%	76,75	81,19	89,1			
3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH			220	172	171	170	99	124	51			
4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH			20	12	11	12	8	12	18			
6	Persentase Balita stunting				30,7	30,2	29,70		30,3	29,9			
7	Cakupan Pelayanan PTM				80%	85%	85%		90%	94,8%			

8	Cakupan Pelayanan Penyakit Menular				80%	85%	85%		100%	100%			
9	TFR (Angka Kelahiran Total)				2,24	2,23	2,22						
10	Prevalensi KB Aktif				73,64	74,84	74,04						
12	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	100%		100%	100%	100%	100%	59.41%	55,02%	60,99%			
13	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100%		100%	100%	100%	100%	75%	72,06%	87,8%			
14	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%		100%	100%	100%	100%	70.8%	80,7%	96,2%			
15	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%		100%	100%	100%	100%	65.08%	64,9%	74,5%			
16	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%		100%	100%	100%	100%	95 %	97,2%	92,7%			
17	Persentase penduduk usia 15 s.d. 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%		100%	100%	100%	100%	95,9%	97,96%	90,3%			
18	Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	76.55%	80,62%	81,25%			
19	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	65.1%	81,43%	92,2%			

20	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
21	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%		100%	100%	100%	100%	99,3%	100%	100%			
22	Persentase penderita terduga TB Paru yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	69,2%	100%	100%			
23	Persentase orang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dapat di jelaskan sebagai berikut

#### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dasar

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar pada Tahun 2023 adalah 83, dengan nilai realisasi sebesar 83,61 Adapun capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar adalah sebesar 98,36% , dikategorikan “Sangat Berhasil” Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar dengan menggunakan hasil survey kepuasan Masyarakat oleh Bagian Umum dan Aparatur Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar yaitu 83,61 cenderung meningkat jika dibandingkan nilai pada tahun 2022 sebesar 81.83, dan tahun 2021 sebesar 77,69.

Keberhasilan indikator ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

- a. Meningkatnya sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan dasar sesuai standar. Sampai dengan Tahun 2023 jumlah Puskesmas di Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah terakreditasi sebanyak 18 Puskesmas dengan pencapaian
  - PARIPURNA : 1 Puskesmas
  - UTAMA : 5 Puskesmas
  - MADYA : 7 Puskesmas
  - DASAR : 5 Puskesmas
- b. Pelaksanaan Pembinaan Terpadu Puskesmas oleh Dinas Kesehatan  
Pembinaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua unsur program yang ada di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu melalui Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) sebagai representasi yang dilaksanakan secara periodik, terpadu antar program, dan berkesinambungan. Melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana Pembina Cluster Binaan, wilayah binaan dibagi menjadi 4 Cluster.
- c. Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan
- d. Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan kualitas Farmasi
- e. Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang bekerjasama dengan BPJS

Dalam pencapaiannya indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar masih terdapat beberapa kendala, diantaranya :

- a. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau
- b. Masih 7 Puskesmas yang belum memenuhi standar atau belum sesuai prototype dari Kementerian Kesehatan
- c. Masih ada Puskesmas yang belum sepenuhnya menerapkan standar

- elayanan medik dasar dan masih 5 Puskesmas belum terakreditasi
- d. Penilaian Kinerja Puskesmas masih belum optimal
  - e. Di beberapa Puskesmas survey kepuasan pelanggan masih menggunakan survey manual
  - f. Masih lemahnya pengelolaan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan Kesehatan
  - g. Tenaga kesehatan yang ada masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan
  - h. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki jaminan Kesehatan
  - i. Kepesertaan BPJS berbasis KK rumit secara administratif. Akibatnya, setiap perubahan atau masalah yang dihadapi salah satu anggota keluarga akan berdampak pada anggota keluarga lainnya yang tercantum dalam KK. “Jika satu anggota keluarga menunggak, maka seluruh anggota keluarga tidak dapat mengakses layanan Kesehatan
  - j. Masih ada masyarakat kategori tidak mampu tapi belum menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI)
  - k. Puskesmas belum ada yang menerapkan BLUD

## 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Rujukan

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Tahun 2023 adalah 76, dengan nilai realisasi sebesar 89,01. Kesehatan Rujukan dengan menggunakan hasil survey kepuasan Masyarakat oleh Bagian Umum dan Aparatur Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Labupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rujukan yaitu sebesar 89,01 meningkat jika dibandingkan realisasi kinerja pada tahun 2021 yaitu sebesar 76,75 dan 2022 yaitu sebesar 81,19.

Keberhasilan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Rujukan didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit  
Pada tahun 2022 guna meningkatkan sarana rujukan Dinas Kesehatan Gedung IGD RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau. Peningkatan



bangunan RSUD Badau. Tidak hanya sarana, Dinas Kesehatan juga mengupayakan pemenuhan prasarana, serta pemenuhan Alat Kesehatan Rumah Sakit. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang dan jasa

Pada Tahun 2015 Melalui SK bupati no 307 Tahun 2015 RSUD dr Achmad Diponegoro ditetapkan sebagai BLUD, dengan demikian RSUD dr Achmad Diponegoro dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menjunjung nilai produktifitas, efisiensi, dan efektifitas. Diharapkan dengan adanya fleksibilitas yang diberikan kepada Badan Layanan Umum Daerah dapat meningkatkan kinerja baik dari segi keuangan maupun dalam segi pelayanan.

b. Meningkatnya mutu pelayanan Rujukan

Sampai dengan tahun 2022, 3 Rumah Sakit di Kabupaten Kapuas Hulu telah terakreditasi dengan Capaian RSUD dr Achmad Diponegoro dengan Predikat Utama, RSUD Semitau Predikat Madya serta RSUD Badau dengan Predikat Dasar.

c. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang dan jasa

Pada Tahun 2015 Melalui SK bupati no 307 Tahun 2015 RSUD dr Achmad Diponegoro ditetapkan sebagai BLUD, dengan demikian RSUD dr Achmad Diponegoro dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menjunjung nilai produktifitas, efisiensi, dan efektifitas. Diharapkan dengan adanya fleksibilitas yang diberikan kepada Badan Layanan Umum Daerah dapat meningkatkan kinerja baik dari segi keuangan maupun dalam segi pelayanan.

Dalam pelaksanaan pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Rujukan menghadapi beberapa kendala, diantaranya :

- a. Masih lemahnya pengelolaan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. RSUD Semitau dan RSUD Badau masih belum bekerjasama dengan BPJS sehingga Pasien dengan status BPJS belum bisa difasilitasi.
- c. Kurang SDM dokter spesialis kurang
- d. Belum dilaksanakan akreditasi tahun 2023 terkait kurang perizinan
- e. Izin operasional belum standar OSS

- f. 2 RSUD belum BLUD pencabutan regulasi di bagian Hukum

3 AKI (Angka Kematian Ibu)

Realisasi Kinerja Indikator Angka Kematian Ibu sebesar 51/100.000 Kelahiran hidup, realisasi kinerja tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 51/100.000 Kelahiran Hidup dengan capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2023 terdapat 2 kasus kematian ibu dari 3.891 Kelahiran Hidup, atau dikonversikan menjadi 51/100.000 KH. Angka kematian ibu baru dapat dihitung ketika kelahiran hidup dalam satu tahun mencapai 100.000 Kelahiran hidup, namun untuk menghitung Angka kematian Ibu dikonversikan dalam 100.000 kelahiran hidup dengan cara jumlah kasus kematian dibagi jumlah kelahiran hidup dalam satu tahun dikalikan seratus ribu kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu tahun 2023 yaitu 1 kasus dengan suspek Epilepsi di Kecamatan bika dan Penyakit Tuberkulosis di Kecamatan Suhaid. Angka kematian Ibu menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 173/100.000 KH, dan tahun 2022 yaitu 172/100.000 KH, telah melampaui target jika dibandingkan target Nasional tahun 2023 yaitu 194/100.000 KH.

4. AKB (Angka Kematian Bayi)

Realisasi Kinerja Indikator Angka Kematian Bayi sebesar 17/1000 Kelahiran hidup, realisasi kinerja tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 15/1000 Kelahiran Hidup dengan capaian kinerja sebesar 86,66%. Pada tahun 2023 terdapat 67 kasus kematian dari 3.891 kelahiran hidup, artinya ada 17 kasus per seribu kelahiran hidup. Angka kematian bayi dihitung dari jumlah kasus kematian dibagi jumlah kelahiran dikalikan 1000. Penyebab terbanyak Asfiksia sebanyak 23 kasus. Sementara penyumbang kematian bayi terbanyak adalah Kecamatan Putussibau Selatan sebanyak 10 kasus.

Keberhasilan capaian indikator AKI dan AKB didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Terlaksananya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, pada Tahun 2023 dari 5.181 ibu hamil di Kabupaten Kapuas Hulu sudah 3.160 ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil dengan kriteria sebagai berikut :
- Mendapatkan asuhan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 1 kali pada trimester I, 1 kali pada trimester II dan 2 kali pada trimester III;
  - Dilakukan oleh Dokter/ dokter spesialis kebidanan, atau Bidan, atau Perawat
  - Standar pelayanan antenatal dengan memenuhi kriteria 10T.
- b. Meningkatnya ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, pada Tahun 2023 dari 4.946 ibu bersalin, sudah 3.564 ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pertolongan persalinan sesuai standar menurut Permenkes no 4 Tahun 2019 adalah:
- Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
  - Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
    - Dokter dan bidan, atau
    - 2 orang bidan, atau
    - Bidan dan perawat.
- c. Meningkatnya bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, pada Tahun 2023 dari 4.710 bayi baru lahir di Kabupaten Kapuas Hulu sudah 3.800 yang telah mendapatkan pelayanan sesuai standar.
- d. Tersedianya bantuan biaya persalinan bagi ibu bersalin tidak mampu yang melahirkan di fasyankes melalui program Jaminan Persalinan
- e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara dengan memperhatikan protokol Kesehatan.
- f. Meningkatnya penguatan sistem rujukan di Kabupaten
- g. Program inovasi Madu Bulin (MAsyarakat PeDULi IBU BersaLIN), yaitu :
- Pemberdayaan masyarakat melalui P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi)
  - Membentuk kelompok donor darah di Kabupaten
  - Membantu mempermudah pengurusan administrasi pasien

- Meminimalisir keterlambatan pelayanan pasien pada tingkat rujukan
- h. Berbagai macam Inovasi – inovasi Puskesmas diantaranya:
- GEBRAK (Gerobak Antar Jemput Ibu Beranak ) dan KEMBAN BULIN (Keterlibatan Masyarakat Bantu Ibu Bersalin) di Puskesmas Silat Hilir
  - AJIB ( antar jemput ibu bersalin ) di Puskesmas Mentebah
  - Inovasi SALONFAS (Semua Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan) di Puskesmas Seberuang
  - Layanan info bunda online dari rumah Puskesmas Silat hilir
- i. Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada saat pelaksanaan persalinan
- j. Penyediaan RTK (Rumah Tunggu Kelahiran), RTK adalah suatu bentuk (rumah/ bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/ keluarga/ kader kesehatan)
- k. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal, Termasuk Audit Sosial Kematian Maternal/Perinatal pada setiap kasus kematian ibu dan bayi

Dalam rangka menurunkan AKI dan AKB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan keluarga yang masih sangat rendah terhadap ibu hamil dapat dilihat dari keterlibatan keluarga dalam pendampingan ibu hamil saat kelas ibu hamil hanya 47,6% artinya 1 dari 2 ibu tidak didampingi keluarga saat kegiatan kelas ibu, sehingga permasalahan kesehatan hanya diketahui oleh ibu
- b. Masih ada persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, 2 dari 5 kasus kematian ibu karena di tolong dukun, dukun tidak bermitra
- c. Kematian Ibu dan neonatal terjadi dikarenakan kompetensi tenaga kesehatan (Bidan dan Dokter Puskesmas) yang belum memadai
- d. Tingginya kejadian hamil tidak diinginkan dan tidak direncanakan (kohort KB masih sulit dimonitor, karena pelayanan KB diluar FKTP belum tercatat dengan baik).
- e. Pengkajian kematian belum bisa dilaksanakan dengan maksimal
- f. Peran serta masyarakat dalam kesehatan ibu dan anak juga dirasakan masih sangat minim, dimana masih ada desa yang tidak melaksanakan Program

- Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), yaitu 1 dari 5 desa belum melaksanakan Program P4K
- g. Regulasi bidang Kesehatan terutama Ibu dan anak yang masih sangat lemah
  - h. Masih terdapat 4 terlalu: Terlalu muda untuk hamil, terlalu tua untuk hamil, terlalu dekat jarak hamil dan terlalu banyak anak.
  - i. Masih terdapat 3 T : terlambat untuk memutuskan dirujuk, terlambat sampai ditempat rujukan dan terlambat dikelola ditempat rujukan.
  - j. Rendahnya pemantauan tafsiran persalinan melalui kantong persalinan
  - k. Rendahnya kepesertaan jaminan Kesehatan pada ibu hamil
  - l. Pelayanan neonatal esensial belum dilaksanakan dengan optimal
  - m. Masih ada fasilitas Kesehatan yang belum memiliki petugas Kesehatan

5. Prevalensi Balita (bawah lima Tahun) stunting

Realisasi Kinerja Indikator prevalensi Balita (bawah lima Tahun) stunting sebesar 29,9 dengan capaian kinerja sebesar 99,32%. Pada Tahun 2023 jumlah balita yang sangat pendek dan pendek 5.040 orang dan jumlah baduta yang diukur sebanyak 16.836 orang. Angka stunting yang digunakan di Kabupaten Kapuas Hulu berasal dari hasil Survei Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita tahun 2023. Gambar 3.8 menggambarkan peta wilayah balita stunting di 23 Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Keberhasilan capaian kinerja Stunting dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

- a. Meningkatnya pemetaan masalah gizi melalui Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi di 23 Kecamatan
- b. Meningkatnya tenaga yang dilatih konselor menyusui Air Susu Ibu (ASI)
- c. Meningkatnya tenaga yang mendapatkan Pelatihan Asuhan Gizi terstandar
- d. Meningkatnya koordinasi dengan opd terkait melalui rapat, rembuk stunting di kabupaten dan kecamatan dan menetapkan wilayah desa intervensi stunting terintegrasi
- e. Penurunan jumlah Balita BGM
- f. Meningkatnya tatalaksana kasus gizi buruk di pusat rehabilitasi gizi buruk (PRGB)

- g. Pemberian makanan tambahan bagi balita kurus dan ibu hamil kurang energi kronis (kek),
- h. Meningkatnya kader posyandu yang dilatih dalam melakukan pemantauan pertumbuhan dan pemberian makan bayi dan anak,
- i. Meningkatnya penyuluhan tentang pemberian makan bayi dan anak serta perilaku hidup bersih sehat di masyarakat
- j. Sudah 98,90% Balita kurang gizi mendapat tambahan asupan gizi
- k. Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mendapat tambahan asupan gizi sudah mencapai 92,10%
- l. Ibu Hamil mengkonsumsi TTD 90 tablet selama hamil sudah mencapai 74,1%
- m. Sudah 60,7% Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya
- n. Pemberian makanan tambahan bagi balita kurus dan ibu hamil kurang energi kronis (kek),
- o. Adanya inovasi pembuatan Grafiti Anak (Grafik Tinggi Badan Anak) yang bertujuan untuk memudahkan kader posyandu dalam memantau pertumbuhan dan menentukan status gizi anak berdasarkan Tinggi Badan menurut Umur (BB/TB).
- p. Meningkatnya kader yang dilatih dalam melakukan pemantauan pertumbuhan dan pemberian makan bayi dan anak,
- q. Meningkatnya desa ODF, sampai dengan 2023 sudah 53 desa melaksanakan dari 278 desa dan 4 kelurahan
- r. Meningkatnya desa yang melaksanakan STBM

Dalam menurunkan stunting Dinas Kesehatan menghadapi beberapa kendala, diantaranya :

- a. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kondisi gizi Balita berkaitan dengan pemantauan pertumbuhan,
- b. Pola pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) yang tidak tepat seperti masih tingginya bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif (15,8%) pada Tahun 2023, dan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang terlalu dini serta tidak memadai.
- c. Advokasi Kader terhadap kepala Desa masih kurang
- d. Kurangnya pendampingan konseling dari Petugas Gizi

- e. 24,2% dari Bumil yang diperiksa menderita Anemi dan 19,6% diantaranya berisiko Kurang Energi Kronis (KEK).
- f. Sebanyak 27,6 % Ibu hamil tidak mengkonsumsi TTD minimal 90 tablet selama hamil
- g. Pengetahuan dan keterampilan kader posyandu yang masih belum memadai, dan minimnya alat untuk memantau pertumbuhan yang mudah digunakan oleh kader di posyandu, juga menjadi salah satu penyumbang masalah stunting di kabupaten Kapuas Hulu
- h. Rendahnya kesadaran ibu/keluarga untuk membawa balitanya ke posyandu, ada 47,7% anak usia 0-5 Tahun tidak terpantau pertumbuhannya (tidak dibawa ke Posyandu secara rutin), kondisi ini diperburuk lagi dengan rendahnya keterampilan kader posyandu, diketahui 2-3 dari 5 orang kader
- i. Sebanyak 15,1% Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
- j. Akses terhadap sumber air bersih yang masih terbatas serta sanitasi yang belum baik.
- k. Masih 81,2% desa belum ODF
- l. Inovasi dalam Posyandu masih kurang
- m. Pembinaan dan pendampingan terhadap petugas dilapangan masih belum maksimal
- n. Penyakit, akses yang tidak memadai ke pelayanan kesehatan , air dan sanitasi
- o. Pemberian Makan Bayi dan Anak dan makanan ibu yang buruk, serta praktik perawatan dan pengasuhan anak yang tidak memadai
- p. Kondisi ekonomi yang tidak memadai
- q. Kualitas Sumber Daya di lini terdepan yang masih sangat terbatas
- r. Pembinaan dan pendampingan terhadap petugas dilapangan masih belum maksimal
- s. Baru 25,9 % Sarana Air Minum Yang Diawasi/ Diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar (Aman)

#### 6. Cakupan Pelayanan Penyakit Tidak Menular

Cakupan Pelayanan Penyakit Tidak Menular diukur dari rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal Penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa, yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan pada usia produktif : 98,0%
- b. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi : 81,4%
- c. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM) :100%
- d. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat : 100%

Pada tahun 2023 realisasi Cakupan Pelayanan Penyakit Tidak Menular sebesar 94,8% telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 90%. Cakupan Penyakit Tidak Menular pada tahun 2022 cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 90,0%.

Berikut gambaran Standar Pelayanan Minimal Penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa :

- a. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Pelayanan kesehatan pada usia produktif Menurut Permenkes nomor 6 tahun 2024 adalah Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :

1. Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
2. Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Pada tahun 2023 dari 183.441 sasaran usia Produktif, yang sudah mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar sebanyak 179.684 orang (98%)

- b. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Menurut Permenkes nomor 4 tahun 2024 adalah setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran tekanan darah
- 2) Edukasi



Pada tahun 2023 dari 72.250 sasaran penderita hipertensi, yang sudah mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar sebanyak 61.275 orang (81,4%).

c. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM)

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM) menurut Permenkes nomor 4 tahun 2019 adalah Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran gula darah;
- 2) Edukasi
- 3) Terapi farmakologi.

Pada tahun 2023 dari 3.365 sasaran penderita Diabetes Mellitus (DM) yang sudah mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar sebanyak 3.365 orang (100%).

d. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat menurut Permenkes nomor 6 tahun 2024 Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi :

- 1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
- 2) Edukasi

Pada tahun 2023 dari 583 sasaran penderita ODGJ yang sudah mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar sebanyak 583 orang (100%)

Keberhasilan indikator Cakupan pelayanan Penyakit Tidak Menular dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

- a. Terlaksananya skrining Penyakit Tidak Menular
  - b. Meningkatnya Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar, pada tahun 2023 sebanyak 61.274 penderita sudah mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar.
  - c. Pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)  
Posbindu PTM merupakan salah satu upaya kesehatan berbasis masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dalam rangka deteksi dini penyakit tidak menular, diantaranya DM dan hipertensi, sampai dengan tahun 2023 sudah 304 Posbindu terbentuk di 282 desa/kelurahan;
  - d. Inovasi SEBATANG BESI (Seruang Tanggap Hidup Sehat Bebas Hipertensi) di Puskesmas Seberuang dan Inovasi DELIPERI (Desa Peduli Hipertensi)
  - e. Meningkatnya Penderita Diabetes Mellitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar
  - g. Terlaksananya Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM
- Dalam pelaksanaannya Dinas Kesehatan juga mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah :

- a. Kurangnya pemahaman pengelola program terhadap indikator kinerja SPM PTM
- b. Alat dan Bahan Dalam pelaksanaan Kegiatan PTM masih terbatas
- c. Program belum terintegrasi dengan program lain sehingga capaian dirasa belum maksimal.
- d. Pengelola Program memegang tugas Rangkap
- e. Banyak penderita yang tidak paham dengan kondisi penyakitnya, sehingga tidak melakukan pengobatan secara menyeluruh
- f. Masih rendahnya tingkat kepatuhan penderita dalam berobat secara teratur dan meminum obat
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini
- h. Sasaran proyeksi berbeda dengan sasaran riil
- i. Kerjasama dan koordinasi LP / LS kurang optimal
- j. RUK/RPK tidak dilaksanakan sesuai *Time Schedule*

## 7. Cakupan Pelayanan Penyakit Menular

Cakupan Pelayanan Penyakit Menular diukur dari rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal Penyakit Menular, yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis : 100%
- b. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV) :99,2%

Pada tahun 2023 realisasi Cakupan Pelayanan Penyakit Menular sebesar 100% telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 90%, dengan capaian kinerja sebesar 111,1% dikategorikan *Sangat Berhasil*. Cakupan Pelayanan Penyakit Menular pada tahun 2023 yaitu 111,1% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 99,61% dan tahun 2021 yaitu 70,53%.

Berikut gambaran Standar Pelayanan Minimal Penyakit Menular tahun 2023:

- a. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis Menurut Permenkes nomor 6 tahun 2024 adalah Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :

- 1) Pemeriksaan klinis
- 2) Pemeriksaan penunjang
- 3) Edukasi

Pada tahun 2023 dari 4687 sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar sebanyak 4687 orang (100%).

- b. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV) Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis 71,68 Menurut Permenkes nomor 6 tahun 2024 adalah Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

- 1) Edukasi perilaku berisiko
- 2) Skrining Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :
  - Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
  - Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC
  - Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
  - Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa
  - Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual)
  - Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
  - Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkoba dan atau zat adiktif suntik lainnya.

Pada tahun 2023 dari 6722 sasaran orang Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV) yang sudah mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar sebanyak 6722 orang (100%).

Keberhasilan indikator Cakupan pelayanan Penyakit Menular dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

- a. Meningkatnya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- b. Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- c. Meningkatnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- d. Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

- e. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
- f. Terlaksananya Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- g. program TB di puskesmas sudah diarahkan kepada *Active Finding*, dimana beberapa Puskesmas telah menerapkan berbagai inovasi, diantaranya :
  - SEPATU (Seberuang Peduli Atasi Tuberkulosis) Melakukan pembentukan dan pembinaan kader TB
  - BENANG TB (Belajar Penanggulangan Tuberkulosis) Puskesmas Bunut Hulu
  - ELIT (Eliminasi Tuberkulosis) Puskesmas Batang Lupar
  - PASERBAT (Pasukan Pengantar Obat TB) Batang Lupar

Dalam pelaksanaannya Dinas Kesehatan juga mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah :

- a. Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang luas dan sulit dijangkau
- b. Kesadaran masyarakat mendatangi dan memanfaatkan fasilitas Kesehatan masih kurang
- c. Keterbatasan sarana, prasarana dan peralatan serta bahan medis dan obat-obatan
- d. Kerjasama dan koordinasi Lintas Program / Lintas Sektoral kurang optimal
- e. RUK/RPK tidak dilaksanakan sesuai *Time Schedule*
- f. Monitoring dan evaluasi kurang optimal
- g. SOP belum dijalankan secara konsisten
- h. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia masih kurang
- i. Adanya Mutasi dan pergantian Pj Program

#### **8. Pervalensi KB Aktif**

Realisasi Kinerja Indikator Prevalensi KB Aktif pada Tahun 2023 sebesar 72,99%, Target indikatornya sebesar 73,84%, dengan capaian kinerja sebesar 98,84%, Prevalensi KB aktif dihitung dari Jumlah Peserta KB aktif dibagi dengan jumlah Pasangan Usia subur (PUS). Pada tahun 2023 dari 48.746 Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif sebanyak 35.581 orang (72,99%). Prevalensi KB aktif mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 66,53% dan tahun 2021 yaitu 82,48%. Realisasi kinerja pada Tahun 2023 yaitu sebesar 72,99% jika dibandingkan dengan target akhir

RENSTRA yaitu sebesar 74,44% maka tingkat kemajuan indikator Prevalensi KB aktif telah mencapai 98,05%.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja Prevalensi KB Aktif diantaranya :

- a. Masih rendahnya kesertaan KB di wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan (Galciltas), serta sasaran khusus seperti Kesertaan KB Pria, PUS dengan anak stunting, PUS miskin, dan PUS Risiko Tinggi 4 (empat) terlalu;
- b. pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) baru 66,58%
- c. kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) baru mencapai 11,95
- d. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, perilaku berisiko, dan pendidikan seksual pada remaja dan PUS;
- e. Belum optimalnya pelayanan KB
- f. Belum optimalnya sertifikasi kompetensi tenaga kesehatan pelayanan KB
- g. Terbatasnya akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan,
- h. Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP baru mencapai 74,38%.

#### **9. Total Fertility Rate (TFR)**

Realisasi Kinerja *Total Fertility Rate* (TFR) pada Tahun 2023 sebesar 1,6 Target indikatornya sebesar 1,9 dengan capaian kinerja sebesar 98,84% dikategorikan sangat berhasil. Total Fertility Rate (TFR) 1,6 berdasarkan hasil Long Form sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik. Capaian kinerja Indikator Total Fertility Rate (TFR) meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yaitu 6,39 dan 2022 sebesar 2,33. Beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR) diantaranya :

- a. Masih tingginya angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19);
- b. Belum Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)

- c. stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK masih belum optimal
- d. Disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR), unmet need, Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) antar wilayah masih tinggi;
- e. Masih tingginya kehamilan yang tidak diinginkan dan masih tingginya tingkat putus pakai kontrasepsi (DO);

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

#### **1. Kesehatan Ibu dan Anak**

Ibu dan anak merupakan kelompok rentan, hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

Angka Kematian Ibu masih menjadi permasalahan di Kabupaten Kapuas Hulu target global SDG untuk menurunkan AKI menjadi 183 per 100.000 KH pada tahun 2024 dan kurang dari 70 per 100.000 KH pada tahun 2030. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya upaya yang lebih strategis dan komprehensif. AKI di Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2019-2023 fluktuatif. Tahun 2023 AKI di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yaitu 42/100.000 KH. Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 masuk ke dalam golongan penyakit lain-lain yaitu suspec status epileptikus dan Tb miliar. Kematian ibu ini dapat dicegah apabila sebelum hamil ibu melakukan Skrining Layak Hamil, mendapatkan pelayanan Ante Natal Care (ANC) secara adekuat dan serta mengikuti saran dan anjuran Tenaga Kesehatan.

Pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin yang sesuai standar ditahun 2023 cenderung meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu. Peningkatan capaian pelayanan kesehatan ibu yang tidak disertai dengan perbaikan angka kematian ibu, mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan maternal. Masih terjadinya 3 T yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat.

Angka Kematian Bayi (AKB) ditahun 2023 14/1000 KH mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan AKB tahun 2019. Untuk menurunkan kematian bayi, maka cakupan pelayanan harus disertai dengan mutu pelayanan yang optimal, sistem rujukan yang sistematis dan terstruktur, serta peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi. Beberapa permasalahan terkait kesehatan ibu dan bayi diantaranya :

- Dukungan keluarga yang masih sangat rendah terhadap ibu hamil
- Kompetensi tenaga kesehatan (Bidan dan Dokter Puskesmas) yang belum memadai

## 2. Gizi Masyarakat

Gizi juga masih menjadi permasalahan di Kabupaten Kapuas Hulu, penurunan *stunting* merupakan salah satu sasaran Pokok RPJMN 2020-2024, Kementerian Kesehatan menargetkan penurunan Balita *Stunting* menjadi 14% di tahun 2024, sementara Balita *stunting* di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 sebesar 29,9%. Upaya penurunan *stunting* tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan.

## 3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Berbagai Penyakit Tidak Menular (PTM) disebabkan karena perilaku gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, kurang aktivitas fisik, pola makan dengan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL). Faktor metabolik adalah faktor risiko penyakit tidak menular berikutnya, seperti hipertensi, gangguan kadar gula darah, dan obesitas. Meningkatnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, DM dan gangguan



jiwa menunjukkan masih perlu ditingkatkannya upaya pencegahan melalui edukasi untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku, yang diikuti dengan skrining, diagnostik, dan pemantauan.

#### 4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Kebutuhan untuk mengendalikan faktor risiko utama untuk menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui pengawasan atau surveilans yang efektif secara rutin dan terkoordinasi. Penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah tuberkulosis, HIV/AIDS, selain penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Perhatian khusus juga ditujukan untuk penyakit-penyakit infeksi baru yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia Public Health Emergency of International Concern (KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar Negara, serta penyakit-penyakit tropis terabaikan (*neglected tropical diseases*)

#### 5. Pelayanan Kesehatan

- Sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang belum paripurna dan Sarana dan prasarana kesehatan dasar yang belum merata.
- Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau.
- Masih ada Puskesmas yang belum sepenuhnya menerapkan standar pelayanan medik dasar dan terakreditasi

#### 6. Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Jumlah dan jenis tenaga kesehatan masih ada yang belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan
- Kualitas dan Kompetensi tenaga kesehatan masih ada yang belum sesuai standar
- Penyebaran tenaga kesehatan tidak merata
- Komposisi tenaga kesehatan yang tidak berimbang

#### 7. Sediaan Farmasi

- Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum sesuai standar
- Pengelolaan obat belum optimal
- Distribusi dan penggunaan obat rasional belum optimal
- Belum optimalnya Pengawasan dan pembinaan sarana kefarmasian

#### 8. Pemberdayaan masyarakat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

- Pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi masih rendah
- Masih Rendahnya kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta, kesan kesehatan masyarakat hanya tugas bidang kesehatan saja
- Pengintegrasian program, kegiatan, dan/atau kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada belum optimal

#### 9. Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan *unmetneed* antar wilayah

#### 10. Tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria;

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada lampiran tabel 2.7

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD		
				Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
		<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>227,445,402,491.00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>215,807,035,041.00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			<b>215,807,035,041.00</b>	
1.	<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>150,964,975,635.00</b>	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			313,683,000.00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	86,158,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	26,387,500.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	13,800,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	19,212,500.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	53,300,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	114,825,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			109,580,640,945.00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	946 Orang/bulan	107,670,095,594.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	223,714,480.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1,275,231,100.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9 Dokumen	23,007,666.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	55,661,089.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10,458,998.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	322,472,018.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			142,300,000.00	
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	75,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	41,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	25,800,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	4,423,842,757.00	
	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				

			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	25 Dokumen	4,423,842,757.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	216,662,600.00	
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6,050,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	210,612,600.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	436,163,575.00	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	266,004,300.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	170,159,275.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,

						Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3,222,601,000.00	
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1,103,072,747.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2,119,528,253.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1,000,470,000.00	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	828,520,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	171,950,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua



						Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			31,628,611,758.00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100% Unit Kerja	31,628,611,758.00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
2.	<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>41,888,991,746.00</b>	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			12,311,696,138.00	
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	4,652,265,189.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	5 Unit	485,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	4 Unit	230,800,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,

						Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	430,800,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	200,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	253,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit	297,800,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	4 Unit	300,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua

						Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	90% Unit	336,398,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	80% Unit	70,984,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	454 Paket	3,618,159,169.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)				
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	0 Layanan	1,045,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	250 Paket	391,489,780.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua

						Kel/Desa
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	28,103,641,608.00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5201 Orang	44,165,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4964 Orang	1,777,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4728 Orang	94,418,400.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22713 Orang	21,920,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40878 Orang	36,518,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168067 Orang	125,660,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26889 Orang	35,560,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68136 Orang	51,650,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3047 Orang	443,727,900.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,

						Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3201 Orang	736,434,400.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8792 Orang	209,680,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	23 Dokumen	74,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15 Dokumen	6,832,268,300.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua

						Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	23 Dokumen	65,340,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23 Dokumen	1,783,100,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	473,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23 Dokumen	1,107,700,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	203 Orang	54,830,000.00	Semua Kota/Kab,

						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	23 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23 Dokumen	5,481,294,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23 Dokumen	0.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	50 Paket	182,100,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				



			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3 Dokumen	2,650,000,008.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	23 Dokumen	5,845,298,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	26 Unit	909,985,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	23 Laporan	77,297,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	593 Orang	241,650,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang	50,590,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	15 Orang	82,739,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	240,939,600.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik				
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	26 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	466,850,000.00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	466,850,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1,006,804,000.00	
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	0 Unit	220,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0 Unit	714,804,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	3 Dokumen	72,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			22,204,187,460.00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	28,875,000.00	
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	28,875,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	22,175,312,460.00	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Orang	21,912,002,160.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	23 Dokumen	263,310,300.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			70,380,200.00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	22,451,000.00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20 Dokumen	22,451,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	17,160,000.00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Dokumen	17,160,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	30,769,200.00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	30,769,200.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5.	1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			<b>678,500,000.00</b>	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	678,500,000.00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	678,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>10,116,593,850.00</b>	

	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			10,116,593,850.00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			802,962,050.00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			67,650,000.00	
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	46,420,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	3 Satuan Pendidikan	21,230,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			735,312,050.00	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	68,436,500.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	228,360,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	278,300,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain				
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	10 Unit	102,104,200.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana				
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	12 Laporan	58,111,350.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.	<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>			<b>5,615,203,000.00</b>	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			1,660,450,000.00	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK				
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	6 Laporan	154,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	12 Laporan	796,950,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua



			(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	379,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	110,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Organisasi	220,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	2,029,319,600.00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	846 Orang	930,600,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua

						Kel/Desa
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	1,098,719,600.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1,196,873,700.00	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32 Laporan	17,600,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	667 Orang	241,853,700.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	23 Unit	916,080,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				

			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	21,340,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			728,559,700.00	
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 Organisasi	153,864,700.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	4,125,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	3 Laporan	65,120,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	39 Kampung	505,450,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

3.	2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>			<b>3,698,428,800.00</b>	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			427,468,800.00	
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	8 Laporan / Dokumen	31,680,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 Unit	330,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	6 Laporan	65,788,800.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	-	-	3,270,960,000.00	

		Kesejahteraan Keluarga				
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	472 laporan	1,557,600,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1416 laporan	1,713,360,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>			<b>1,521,773,600.00</b>	
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>			<b>1,521,773,600.00</b>	
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>1,521,773,600.00</b>	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,314,773,600.00	
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	111,840,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	31,169,600.00	-

	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1,089,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	82,764,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	207,000,000.00	
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	207,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	<b>J U M L A H</b>				<b>227,445,402,491.00</b>	

## **2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2023. Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui musrenbang kecamatan antara lain Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Tabel 2.8

## Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KEC	KEL / Desa	USULAN KE	STATUS
1	29-01-2024	KADES KELAKAR	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembangunan Gedung Olahraga Panjang 17 M Lebar 24 M	Dusun Simpang Mas Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu, Kab. Kapuas Hulu	Hulu Gurung	Kelakar	Kab / Kota	Dikembalikan
2	29-01-2024	KADES SASAN	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Belum Selesainya Pembangunan Postu Kesehatan Desa, Maka Dari Itu Masyarakat Sangat Perlu Bantuan Peningkatan Pembangunan Postu Tersebut	Dusun Sasan Lintas, Kab. Kapuas Hulu	Pengkadan	Sasan	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
3	29-01-2024	KADES MUJAN	Pembangunan Puskesmas	Puskesmas yang ada bangunannya sudah tidak layak.	Desa Mujan, Kab. Kapuas Hulu	Boyan Tanjung	Mujan	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan



4	29-01-2024	KADES KELAKAR	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembangunan Lapangan Futsal Panjang 40 M Lebar 60 M	Dusun Nanga Laki Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu, Kab. Kapuas Hulu	Hulu Gurung	Kelakar	Kab / Kota	Dikembalikan
5	29-01-2024	KADES HULU PENGKADAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Bangunan Puskesmas Pembantu sudah banyak yang rusak dan bocor.	Rt 001 Dusun Sukaramai, Kab. Kapuas Hulu	Pengkadan	Hulu Pengkadan	Kab / Kota	Validasi Mitra Bappeda
6	29-01-2024	KADES MUBUNG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Peningkatan Lapangan Bola Kaki / pekerjaan pengerasan Desa Mubung Volume Panjang 110 m X 85 m	Desa Mubung Dusun Puntir Jaya Rt / Rw 003 /002, Kab. Kapuas Hulu	Hulu Gurung	Mubung	Kab / Kota	Dikembalikan
7	29-01-2024	KADES NANGA RET	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Belum ada rumah dinas Bidan	Dusun SEpan Au, Kab. Kapuas Hulu	Boyan Tanjung	Nanga Ret	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
8	29-01-2024	KADES PERMATA	Pembangunan Puskesmas	Puskesmas Peninkatan ke Pustu	Dusun Nanga Pedian, Kab. Kapuas Hulu	Pengkadan	Permata	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah

9	29-01-2024	KADES KARYA MAJU	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Ambulance desa Sebanyak 1 Unit Untuk Desa Karya Maju,Kec. Boyan Tanjung	Desa Karya Maju, Kab. Kapuas Hulu	Boyan Tanjung	Karya Maju	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
10	29-01-2024	KADES KERANGAN PANJANG	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pembangunan Pustu (P 10 X L 10)	Desa Kerangan Panjang, Dusun Cahaya Baru, Kab. Kapuas Hulu	Pengkadan	Kerangan Panjang	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
11	29-01-2024	KADES TUBANG JAYA	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan gedung Aula Posyandu Harum sari Desa Tubang Jaya Luas 20 Meter Panjang 20 Meter	Dusun Landau Bunus RT 002 RW 001 Desa Tubang Jaya, Kab. Kapuas Hulu	Boyan Tanjung	Tubang Jaya	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
12	29-01-2024	KADES SRI WANGI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Fasilitas yang sudah ada tidak memadai untuk ditempati	RT.01/RW.01 Dusun Gurung Ladan, Kab. Kapuas Hulu	Boyan Tanjung	Sri Wangi	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
13	30-01-2024	KADES NANGA MENTEBAH	Advokasi dan Promosi I Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jalan lingkungan pemukiman	Dusun Mentebah kiri 01, Desa Nanga Mentebah, Kab. Kapuas Hulu	Mentebah	Nanga Mentebah	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
14	30-01-2024	KADES NANGA MANDAY	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke	Kurangnya Alat2 Kesehatan, Serta Kurangnya Makanan Yg Bergizi Untuk Pencegahan Stunting Didesa Nanga Manday	Dusun Tanjung Kapuas Rt 01, Kab. Kapuas Hulu	Bika	Nanga Manday	Kab / Kota	Pengajuan Usulan

			Fasilitas Kesehatan						
15	30-01-2024	KADES SEMERANTAU	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Banyak Masyarakat Yang Belum Memiliki Sdm Sehingga Rendahnya Pemahaman Di Tingkat Desa	Desa Semerantau Kecamatan Kalis, Kab. Kapuas Hulu	Kalis	Semerantau	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
16	30-01-2024	KADES SEMERANTAU	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Penambahan Tenaga Medis Dan Pengadaan Pengobatan Gratis Bagi Lansia Balita Bumil Dan Lain Lain Penambahan Honorium Bagi Kader Kesehatan Masyarakat	DESA SEMERANTAU KECAMATAN KALIS, Kab. Kapuas Hulu	Kalis	Semerantau	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
17	30-01-2024	KEPALA DESA TANJUNG	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan	perlu pembangunan tower	Desa Tanjung, Kab. Kapuas Hulu	Mentebah	Tanjung	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah

			Jaringan Internet						
18	30-01-2024	KADES TAPANG DA"AN	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Postu, Mengingat Jarak Tempuh Dari Pusat Desa Kurang Lebih 8000 km	Dusun Sungai Umbin Desa Tapang Da'an Kecamatan Kalis, Kab. Kapuas Hulu	Kalis	Tapang Da'an	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
19	30-01-2024	KADES TAPANG DA"AN	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Ambulan Darat/Air Mengingat Jarak Tempuh Dari Pusat Desa Menuju Puskesmas Sangat Jauh yang Menjadi Kendala Masyarakat Desa Tapang Da'an Selama Ini	Desa Tapang Da'an, Kab. Kapuas Hulu	Kalis	Tapang Da'an	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
20	30-01-2024	JULIDAS	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan PUSKESTU Sesuai Standar	Dsn Riam, RT 004, Kab. Kapuas Hulu	Kalis	Segiam	Kab / Kota	Pengajuan Usulan
21	30-01-2024	KADES NANGA RAUN	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Perlu Adanya Penambahan Tenaga Kesehatan khususnya di Polindes Nanga Arong	Dusun Nanga Arong, Kab. Kapuas Hulu	Kalis	Nanga Raun	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan

22	31-01-2024	KADES BAJAU ANDAI	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	bangunan sedang rusak berat dan tidak layak digunakan	desa bajau andai dusun batu pansap rt 001, Kab. Kapuas Hulu	Empanang	Bajau Andai	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
23	31-01-2024	KADES MERAKAI PANJANG	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehap Berat PUSTU Desa merakai panjang	Desa Merakai Panjang, Kab. Kapuas Hulu	Puring Kencana	Merakai Panjang	Kab / Kota	Validasi Mitra Bappeda
24	31-01-2024	KADES KANTUK BUNUT	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rusaknya Bangunan Polindes Lama Desa Kantuk Bunut Sehingga Perlu Adanya Pembangunan Baru	Dusun Kantuk Balau , Kab. Kapuas Hulu	Puring Kencana	Kantuk Bunut	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
25	31-01-2024	KADES MERAKAI PANJANG	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Usulan Bantuan Benang Tenun Untuk Kelompok Benang Tenun 3000 Kotak	Desa Merakai Panjang, Kab. Kapuas Hulu	Puring Kencana	Merakai Panjang	Kab / Kota	Validasi Mitra Bappeda
26	31-01-2024	KADES SUNGAI MAWANG	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	Untuk Benang Tenun	Desa Sungai Mawang, Kab. Kapuas Hulu	Puring Kencana	Sungai Mawang	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan

			dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)						
27	31-01- 2024	KADES KANTUK ASAM	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Perlunya Bantuan Benang Di Desa Kantuk Asam	desa kantuk asam, Kab. Kapuas Hulu	Puring Kencana	Kantuk Asam	Kab / Kota	Pengajuan Usulan
28	31-01- 2024	KADES MANTAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tidak ada tenaga kesehatan	Desa Mantan, Kab. Kapuas Hulu	Suhaid	Mantan	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
29	01-02- 2024	KADES NANGA LEBOYAN	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Minimnya fasilitas kesehatan Postu Dusun Mersak Polindes Dusun Batu Rawan	Dusun mersak dan Dusun Batu Rawan, Kab. Kapuas Hulu	Selimbau	Nanga Leboyan	Kab / Kota	Pengajuan Usulan
30	01-02- 2024	KADES ENGKEREN GAS	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rusak Berat panjang 7x9	DESA ENGKERENGAS, Kab. Kapuas Hulu	Selimbau	Engkerenga s	Kab / Kota	Dikembalik an

31	01-02-2024	KADES GERAYAU	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Perlu adanya rehabilitasi karna rusak berat	Dusun Bukit Raya 1, Desa Gerayau, Kab. Kapuas Hulu	Selimbau	Gerayau	Kab / Kota	Dikembalikan
32	01-02-2024	KADES GERAYAU	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Perlu adanya pembangunan PUSTU karna belum ada	Dusun Bukit Raya 1, Desa Gerayau, Kab. Kapuas Hulu	Selimbau	Gerayau	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
33	01-02-2024	KADES NIBUNG	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kondisi Rumah PUSTU Desa Nibung yang rendah dan harus ditinggikan tiang tongkatnya	Dusun Kedaung 1 Desa Nibung, Kab. Kapuas Hulu	Selimbau	Nibung	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
34	01-02-2024	KADES MAWAN SELIMBAU	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tidak ada pustu di desa dan tenaga tempat tinggal tenaga medis maka perlu dibangun pustu 1 Unit	Dusun Kuala Kapar, Kab. Kapuas Hulu	Selimbau	Mawan	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
35	01-02-2024	KADES SEKUBAH	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kondisi Bangunan Rusak Berat dibagian atap	Dusun Sekubah Desa Sekubah, Kab. Kapuas Hulu	Selimbau	Sekubah	Kab / Kota	Dikembalikan
36	01-02-2024	KADES TEMPURAU	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	lemahnya sektor pertanian dan peternakan	tempurau, Kab. Kapuas Hulu	Selimbau	Tempurau	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan

			Akseptor (UPPKA)						
37	01-02-2024	ANDREAS LINCANG	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kondisi Desa yang harus menyebrang ke semitau masyarakat sedikit kesusahan dalam berobat atau pun mau mengecek Kesehatan. Maka kami mohon untuk di bangun PUSTU (Puskesmas Pembantu) Beserta Tenaga Kesehatannya.	Dusun Nanga Kenepai, Desa Nanga Kenepai, Kab. Kapuas Hulu	Semitau	Nanga Kenepai	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
38	01-02-2024	KADES NANGA LEMEDAK	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	KARENA BELUM ADA AMBULANCE DARAT DIDESA NANGA LEMEDAK	DESA NANGA LEMEDAK, Kab. Kapuas Hulu	Semitau	Nanga Lemedak	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
39	01-02-2024	KADES TANJUNG	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas kesehatan sudah tidak layak	Dusun Tanjung Kapuas Hilir, Kab. Kapuas Hulu	Suhaid	Tanjung	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
40	01-02-2024	KADES SEMALAH	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	kondisi bangunan postu saat ini rusak berat	dusun semalah jaya 2, Kab. Kapuas Hulu	Selimbau	Semalah	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan



41	01-02-2024	KADES JONGKONG KIRI HULU	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	belum tersedia nya tong sampah setiap rumah	Dusun Jongkong Kiri Hulu, Kab. Kapuas Hulu	Jongkong	Jongkong Kiri Hulu	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
42	01-02-2024	KADES JONGKONG KIRI HULU	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Tabung Oksigen	Dusun Jongkong Kiri Hulu, Kab. Kapuas Hulu	Jongkong	Jongkong Kiri Hulu	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
43	01-02-2024	KADES JONGKONG KIRI HULU	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	rehabilitas polindes	Dusun Ujung Ubut, Kab. Kapuas Hulu	Jongkong	Jongkong Kiri Hulu	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
44	01-02-2024	KADES SEKULAT	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	agar tidak terjadinya kecelakaan bagi para masyarakat yang berobat ke polindes, maka dari itu agar tercapainya rehab pelataran polindes desa sekulat	dusun batu permai, Kab. Kapuas Hulu	Selimbau	Sekulat	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
45	01-02-2024	KADES SASAN	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Belum Adanya Ambulan Desa, Maka Dari Itu Masyarakat Desa Sasan Sangat Membutuhkan Bantuan Ambulan	Desa Sasan Kecamatan Pengkadan, Kab. Kapuas Hulu	Pengkadan	Sasan	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
46	02-02-2024	KADES PERJUK	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi	karna masih minimnya akses internet	Desa perjuk, Kab. Kapuas Hulu	Silat Hulu	Perjuk	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah

			Kesehatan dan Jaringan Internet						
47	02-02-2024	KADES NANGA NGERI	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	MEMPERBAIKI JARINGAN YANG TELAH ADA YANG TELAH LAMA RUSAK	DUSUN PELITA JAYA, Kab. Kapuas Hulu	Silat Hulu	Nanga Ngeri	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
48	02-02-2024	KADES SUKA MAJU	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Perehapan Gedung Polindes Rt.04 Dusun Hilir Gurung, sudah banyak yang harus di perbaiki, 1 Paket Rp. 100.000.000	Dusun Hilir Gurung, Kab. Kapuas Hulu	Mentebah	Suka Maju	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
49	02-02-2024	KADES PANGERAN	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi Polindes Desa Pangeran Rt 01 , Lantai rapuh , Wc tidak bisa di gunakan , dinding rusak.	Dusun Keluarga, Kab. Kapuas Hulu	Silat Hilir	Pangeran	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
50	02-02-2024	KADES PANGERAN	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitas Pustu Desa Pangeran , Atap Bocor , Dek Rusak, pintu Rusak , dan Tiang rapuh ( ukuran 12 X 17 M )	Dusun Rejosari 2 , RT 01, Kab. Kapuas Hulu	Silat Hilir	Pangeran	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah

51	02-02-2024	KADES NANGA LUNGU	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu yang didirikan pada tahun 2006,sampai saat ini belum pernah di rehap,keadaannya semakin parah.maka dari itu mohon kepada pemerintah kab.kapuas Hulu dapat segera menanganinya	Dusun Bina Sejahtera, Kab. Kapuas Hulu	Silat Hulu	Nanga Lungu	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
52	02-02-2024	KADES NANGA PALA	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehap Poskesdes Desa Nanga Pala, karena kondisi bangunan Poskesdes sudah rusak berat	Dusun Nanga Ranyai, Kab. Kapuas Hulu	Seberuang	Nanga Pala	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
53	02-02-2024	KADES RIAM TAPANG	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	belum tersedianya polindes menyebabkan persalinan menjadi susah	Riam Tapang, Kab. Kapuas Hulu	Silat Hulu	Riam Tapang	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
54	03-02-2024	KADES BUNUT TENGAH	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	GEDUNG POSYANDU TIDAK MEMADAI	DUSUN KARYA BHAKTI, Kab. Kapuas Hulu	Bunut Hilir	Bunut Tengah	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
55	03-02-2024	KADES UJUNG PANDANG	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	pembuatan lanting Garasi Speed Ambulan Desa	Dusun Kubu Hulu Desa ujung Pandang , Kab. Kapuas Hulu	Bunut Hilir	Ujung Pandang	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
56	03-02-2024	KADES BATU LINTANG	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi Gedung Poskesdes	Dusun Pulan, Kab. Kapuas Hulu	Embaloh Hulu	Batu Lintang	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah

57	03-02-2024	KADES BATU LINTANG	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlu adanya Prasarana kesehatan	Dusun Pulan dan Dusun Sungai Utik, Kab. Kapuas Hulu	Embaloh Hulu	Batu Lintang	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
58	04-02-2024	KADES LAWIK	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rehap Rumah Postu (1 unit )	Dusun merean RT 003 Desa Lawik, Kab. Kapuas Hulu	Embaloh Hilir	Lawik	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
59	04-02-2024	KADES UJUNG BAYUR	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Bangunan Sudah Harus Direhap	Desa Ujung Bayur, Kab. Kapuas Hulu	Embaloh Hilir	Ujung Bayur	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
60	04-02-2024	KADES KELILING SEMULUNG	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	kondisi Rumah Polindes yang Lama sudah tidak layak Huni	dusun semulung, Kab. Kapuas Hulu	Embaloh Hilir	Keliling Semulung	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
61	04-02-2024	KADES JONGKONG KIRI HULU	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Jambanisasi/WC	Dusun Ujung Ubut, Kab. Kapuas Hulu	Jongkong	Jongkong Kiri Hulu	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
62	04-02-2024	KADES JONGKONG KIRI HULU	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	pengadaan tong penampung ari hujan	Dusun Teluk Saka, Kab. Kapuas Hulu	Jongkong	Jongkong Kiri Hulu	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
63	04-02-2024	KADES LABIAN	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Perehapan POSKESDES Desa Labian I Unit Dengan Kondisi Bangunan Sudah Rusak Berat	Dusun Ukit-ukit, Desa Labian, Kab. Kapuas Hulu	Batang Lupa	Labian	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan

64	04-02-2024	KADES EMPERIAN G	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Lapangan Bola Kaki yang belum memadai terutama, Dasar lapangan tidak rata dan berlumpur	DESA EMPERIANG, Kab. Kapuas Hulu	Seberuang	Emperiang	Kab / Kota	Dibatalkan
65	05-02-2024	KADES PULAU MAJANG	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Bangunan Gedung Pustu Rusak Parah sehingga pelayanan masyarakat tidak maksimal. volume bangunan yang ingin direhabilitasi panjang 10 meter x lebar 15 meter.	Dusun Raden Sura RT 005 RW 002 Desa Pulau Majang, Kab. Kapuas Hulu	Badau	Pulau Majang	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
66	05-02-2024	KADES TAJAU MADA	"Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))"	PELATIHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DESA TAJAU MADA, Kab. Kapuas Hulu	Seberuang	Tajau Mada	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
67	05-02-2024	KADES MADANG PERMAI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	KURANGNYA PRASARANA PUSKESDES UKURAN 9 METER X 12 METER	DESA MADANG PERMAI, Kab. Kapuas Hulu	Suhaid	Madang Permai	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah

68	05-02-2024	KADES KANDUNG SULI	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Mobil Siaga/Ambulance Desa	Kandung Suli, Kab. Kapuas Hulu	Jongkong	Kandung Suli	Kab / Kota	Pengajuan Usulan
69	05-02-2024	KADES KANDUNG SULI	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	pengadaan Jaringan Internet Desa	Kandung Suli, Kab. Kapuas Hulu	Jongkong	Kandung Suli	Kab / Kota	Pengajuan Usulan
70	05-02-2024	KADES KENSURAY	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jaringan internet di Desa Kensuray sangat buruk	Dusun Landau Belaban, Kab. Kapuas Hulu	Kalis	Kensuray	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
71	05-02-2024	KADES KENSURAY	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kondisi Poskedes Sudah Rusak Berat dengan Ukuran Panjang 8 Meter dan Lebar 9 Meter	Dusun Landau Belaban, Kab. Kapuas Hulu	Kalis	Kensuray	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
72	05-02-2024	KADES NANGA EMBALOH	Pembangunan Puskesmas	Babgunan PUSKESMAS tersebut sudah rawan digunakan, sudah banyak yang rusak,	EMBALOH HILIR, Kab. Kapuas Hulu	Embaloh Hilir	Nanga Embaloh	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
73	05-02-2024	KADES NANGA EMBALOH	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Ruamah Dinas Doktor Lantainya Sudah Ambruk	EMBALOH HILIR, Kab. Kapuas Hulu	Embaloh Hilir	Nanga Embaloh	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan

74	05-02-2024	KADES NANGA EMBALOH	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rumah Dinas Tenaga Kesehatan tersebut masih kurang. bahkan ada tenaga kesehatan yang mengontrak rumah warga	EMBALOH HILIR, Kab. Kapuas Hulu	Embaloh Hilir	Nanga Embaloh	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
75	05-02-2024	KADES NANGA EMBALOH	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PUSKESMAS EMBALOH HILIR perlu adanya pengadaan SPEED 15 HP + Body Untuk mempermudah Pengunjungan Kedesa- desa yang melewati jalur air yang sempit	EMBALOH HILIR, Kab. Kapuas Hulu	Embaloh Hilir	Nanga Embaloh	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
76	06-02-2024	KADES NANGA LOT	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pembangunan Tower BTS Dusun Sungai Rusa-Dusun Nanga Nyawa	Dusun Sungai Rusa-Dusun Nanga Nyawa, Kab. Kapuas Hulu	Seberuang	Nanga Lot	Kab / Kota	Dibatalkan
77	06-02-2024	KADES JONGKONG KIRI TENGAH	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Perlu adanya POSKESDES/PUSTU guna menunjang program perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat desa	Dusun Setia, Kab. Kapuas Hulu	Jongkong	Jongkong Kiri Tengah	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
78	06-02-2024	KADES SENEHAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Puskesmas pembantu yang ada di senehan mengalami rusak berat. sehingga tidak bisa ditempati.	Dusun Senehan, Kab. Kapuas Hulu	Seberuang	Senehan	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah

79	07-02-2024	KADES BELUIS HARUM	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rusak Berat	Desa Beluis Harum, Dusun Beluis Lelam, Kab. Kapuas Hulu	Seberuang	Beluis Harum	Kab / Kota	Pengajuan Usulan
80	07-02-2024	KADES SELIMU	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Di butuhnya Tenaga Kesehatan status PNS untuk bertugas di desa Selimu, untuk pelayanan Kesehatan Masyarakat, Selama ini tidak ada tenaga medis yang bekerja di Desa Selimu, Sehingga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus ke desa lain.	Dusun Sumber Rejeki, Desa Selimu, Kab. Kapuas Hulu	Silat Hulu	Selimu	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
81	08-02-2024	KADES TANJUNG KELILING	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	BERHUBUNG PUSAT DESA JAUH DARI PUSAT KESEHATAN. OLEH SEBAB ITU PEMERINTAH DESA TANJUNG KELILING MENINGINKAN ATAU MENGUSULKAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN. YAITU PUSKESDES ATAU PUSTU.	DESA TANJUNG KELILING, Kab. Kapuas Hulu	Seberuang	Tanjung Keliling	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah



82	08-02-2024	KADES MAWAN PENGKADAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Keadaan/Kondisi bangunan pustu sudah perlu di Rehab, maka dari itu kami mengajukan Reahabilitasi Bangunan Pustu di Desa Mawan, Kecamatan Pengkadan	Dusun Belibis, Desa Mawan, Kab. Kapuas Hulu	Pengkadan	Mawan	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
83	08-02-2024	KADES JERENJANG	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tenaga Kesehatan (MEDIS)	Desa Jerenjang, Kab. Kapuas Hulu	Seberuang	Jerenjang	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
84	09-02-2024	KADES BEKUAN	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tenaga Bidan dan Perawat	Desa Bekuan, Kab. Kapuas Hulu	Seberuang	Bekuan	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
85	09-02-2024	KADES SUKA MAJU PUTUSSIBAU SELATAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rusak Berat	Desa Suka Maju, Kab. Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	Suka Maju	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah

86	09-02-2024	KADES MELAPI	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tidak adanya Jaringan Akses Internet d SMPN 13 Putussibau, dan sangat susah bagi Guru dan Murid dalam melaksanakan Pembelajaran secara Online	SMPN 13 Putussibau, Kab. Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	Melapi	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
87	09-02-2024	KADES LAUK	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Karena Pembangunan Pos Pelayanan Kesehatan Sangat diperlukan untuk menunjang keberlangsungan pelayanan kesehatan di Desa.	Desa Lauk, Kab. Kapuas Hulu	Putussibau Utara	Lauk	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
88	09-02-2024	KADESBAN UATANGA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Peningkatan rabat beton jalan kabupaten dari dusun benua tengah hulu menuju dusun benua tengah hilir panjang 3,4 km lebar 4 m	Dusun Benua Tengah Hulu dan Dusun Benua Tengah Hilir Desa Banua Tengah, Kab. Kapuas Hulu	Putussibau Utara	Banua Tanga	Kab / Kota	Validasi Mitra Bappeda
89	09-02-2024	KADES NANGA SAMBUS	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Gedung Postu Yang ada di Desa saat ini Sangat tidak Layak Untuk di Huni Oleh Tenaga Kesehatan, Apalagi Untuk Pasien Yang akan Berobat guna Untuk Kesembuhannya, Maka dari itu Agar kiranya Gedung	Desa Nanga Sambus, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. , Kab. Kapuas Hulu	Putussibau Utara	Nanga Sambus	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah

				Tersebut Segera di Renofasi, Guna demi Kelayakannya, Sesuai dengan Namanya Gedung POSTU Desa.					
90	09-02-2024	KADES NANGA NYABAU	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Fasilitas Kesehatan Puskesmas Pembantu ( PUSTU ) Desa Nanga Nyabau Mengalami Rusak Berat	Dusun Nanga Nyabau, Desa Nanga Nyabau, Kab. Kapuas Hulu	Putussibau Utara	Nanga Nyabau	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
91	10-02-2024	KADES NANGA LOT	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pembangunan tower 1 paket,sarana informasi dan komunikasi sangatlah penting dan berguna bagi masyarakat.	Dusun Nanga Nyawa, Kab. Kapuas Hulu	Seberuang	Nanga Lot	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
92	10-02-2024	KADES BUNUT HILIR	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rusak Ringan dan Terlalu Kecil, dengan panjang 25 M dan Lebar 5 M.	Jalan Pendidikan, Dusun Dilaga, Rt 003/Rw 002, Kab. Kapuas Hulu	Bunut Hilir	Bunut Hilir	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
93	10-02-2024	KADES TANJUNG LOKANG	Pembangunan Puskesmas	belum tersedia Puskesmas Pembantu (PUSTU) di Desa Tanjung Lokang, sehingga perlu dilakukan pembangunan Pustu dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa	Desa Tanjung Lokang, Kab. Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	Tanjungloka ng	Kab / Kota	Dibatalkan

				Tanjung Lokang					
94	10-02-2024	KADES TANJUNG LOKANG	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	belum tersedianya Puskesmas Pembantu (PUSTU) di Desa Tanjung Lokang, dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Desa Tanjung Lokang	Desa Tanjung Lokang, Kab. Kapuas Hulu	Putussibau Selatan	Tanjungloka ng	Kab / Kota	Verifikasi Perangkat Daerah
95	11-02-2024	KADES SEMUNTIK	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Belum tersedianya tower jaringan internet di desa semuntik	DESA SEMUNTIK, KAB. KAPUAS HULU, Kab. Kapuas Hulu	Badau	Semuntik	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
96	11-02-2024	KADES TAJUM	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Belum memiliki bidan desa sehingga bumil dan balita dalam pemeriksaan harus menempuh perjalanan 20 km ke Puskesmas Badau.	Desa Tajum kecamatan badau kabupaten kapuas hulu, Kab. Kapuas Hulu	Badau	Tajum	Kab / Kota	Verifikasi Kecamatan
97	11-02-2024	KADES KEKURAK	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	kondisi rumah dinas dan polindes rusak sedang	Desa kekurak, Kab. Kapuas Hulu	Badau	Kekurak	Kab / Kota	Pengajuan Usulan

98	11-02-2024	KADES TINTING SELIGI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	kondisi pustu Sui tembaga rusak parah	Desa Tinting seligi, Kab. Kapuas Hulu	Badau	Tinting Seligi	Kabupat en / Kota	Pengajuan Usulan
----	------------	----------------------------	---	--	--	-------	-------------------	-------------------------	---------------------

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perkembangan Penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan adanya window opportunity di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif, yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2030.

Jumlah wanita usia subur akan meningkat dari tahun 2015 dan diperkirakan ada 6 ribu ibu hamil setiap tahun. Angka ini merupakan estimasi jumlah persalinan dan jumlah bayi lahir, yang juga menjadi petunjuk beban pelayanan ANC, persalinan, dan neonatus/bayi.

Penduduk usia kerja yang terus meningkat pada tahun 2015. Juga Penduduk berusia di atas 60 tahun meningkat. Implikasi kenaikan penduduk lansia ini terhadap sistem kesehatan adalah (1) meningkatnya kebutuhan pelayanan sekunder dan tersier, (2) meningkatnya kebutuhan pelayanan home care dan (3) meningkatnya biaya kesehatan. Konsekuensi logisnya adalah pemerintah harus juga menyediakan fasilitas yang ramah lansia dan menyediakan fasilitas untuk kaum disable mengingat tingginya proporsi disabilitas pada kelompok umur ini.

Masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin bertambah, dan ini menyebabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka.

Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia. Di samping kesehatan, pendidikan memegang porsi yang besar bagi terwujudnya kualitas SDM Indonesia. Namun demikian, walaupun rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi angka ini belum memenuhi tujuan program wajib belajar 9 tahun. Menurut perhitungan Susenas Triwulan I tahun 2013, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia adalah 8,14 tahun. Keadaan tersebut erat kaitannya dengan Angka Partisipasi

Sekolah (APS), yakni persentase jumlah murid sekolah di berbagai jenjang pendidikan terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai.

Disparitas Status Kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-pedesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pedesaan, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health Coverage - UHC). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Untuk mengendalikan beban anggaran negara yang diperlukan dalam JKN memerlukan dukungan dari upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan tidak mudah jatuh sakit. Perkembangan kepesertaan JKN ternyata cukup baik. Penambahan peserta yang cepat ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, sehingga terjadi antrian panjang yang bila tidak segera diatasi, kualitas pelayanan bisa turun.

Kesetaraan Gender. Kualitas SDM perempuan harus tetap perlu ditingkatkan, terutama dalam hal: (1) perempuan akan menjadi mitra kerja aktif bagi laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik; dan (2) perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerus karena fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan SDM di masa mendatang.

Berlakunya Undang-Undang Tentang Desa. Pada bulan Januari 2014 telah disahkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejak itu, maka setiap

desa akan mendapat dana alokasi yang cukup besar setiap tahun. Simulasi APBN 2015 misalnya, ke desa akan mengalir rata-rata Rp 1 Miliar. Kucuran dana sebesar ini akan sangat besar artinya bagi pemberdayaan masyarakat desa. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) akan lebih mungkin diupayakan di tingkat rumah tangga di desa, karena cukup tersedianya sarana-sarana yang menjadi faktor pemungkinnya (enabling factors).

Berlakunya Peraturan Tentang Sistem Informasi Kesehatan. Pada tahun 2014 juga diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tentang Sistem Informasi Kesehatan (SIK). PP ini mensyaratkan agar data kesehatan terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengelola SIK sesuai dengan kewenangan masing-masing

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Meningkatkan Angka Harapan Hidup Masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
4. Meningkatkan Indikator tujuan adalah Angka Harapan Hidup (AHH),
5. Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM, Sarana dan Prasarana.



## Sasaran

Adapun sasaran Dinas Kesehatan adalah,

### 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak

Indikator sasaran adalah,

- a. Angka Kematian Ibu (AKI). Pada tahun 2022 AKI Kapuas Hulu adalah sebesar 159,4 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Untuk tahun 2023 51 per 100.000 turun dan pada tahun 2024 AKI naik menjadi 122 per 100.000 KH. Target pada tahun 2025 AKI turun menjadi 50 per 100.000 KH.
- b. Angka Kematian Bayi (AKB). Pada tahun 2022 AKB Kapuas Hulu adalah sebesar 13,5 per 1.000 KH. Target pada tahun 2023 AKB turun menjadi 17 per 1.000 KH dan untuk tahun 2024 masih tetap seperti tahun 2023 yakni 17 per 1.000 KH dan untuk tahun 2025 target turun menjadi 9 per 1.000 KH.
- c. Persentase balita (bawah lima tahun) *stunting*. Pada tahun 2023 persentase balita *stunting* di Kapuas Hulu sebesar 29,9 %, target pada tahun 2024 persentase balita *stunting* turun menjadi sebesar 29,54% dan untuk tahun 2025 target turun menjadi 29,0 %.

### 2. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Indikator sasaran adalah:

- a. Cakupan Pelayanan PTM, diharapkan Cakupan Pelayanan Penyakit tidak menular pada tahun 2023 dapat mencapai 94,8% dan tahun 2025 menjadi 97 %
- b. Cakupan Pelayanan Penyakit Menular, diharapkan Cakupan Pelayanan Penyakit menular pada tahun 2023 dapat mencapai 100% dan untuk tahun 2025 sebesar 100%

### 3. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana

Indikator sasaraannya adalah

- a. TFR (Angka Kelahiran Total) untuk tahun 2023 sebesar 2,23 dan tahun

2024 menjadi 2,22 dan untuk target tahun 2025 diturunkan menjadi 2,21

- b. Prevalensi KB Aktif untuk tahun 2023 sebesar 72,9% dengan target 73,84% untuk tahun 2024 target yang ditetapkan 74,04% dengan capaian 76,9% artinya ada kenaikan yang signifikan terkait pengguna KB terutama pada Pasangan Usia Subur (PUS) dan untuk tahun 2025 target yang ditetapkan 74,84%.

#### **4. Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan RB dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator sasaran adalah,

- a. Predikat SAKIP, pada tahun 2024 Predikat SAKIP Dinas Kesehatan, PP dan KB adalah B diharapkan dapat bertahan B di tahun 2025.

#### **5. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan**

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan dasar, pada tahun 2024 realisasi adalah 84,75% dengan target sebesar 84 %. Sedangkan tahun 2023 sebesar 83 % artinya ada kenaikan yang signifikan dan untuk tahun 2025 meningkat diatas 84%.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan rujukan, pada tahun 2022 adalah 81,19% target pada tahun 2024 sebesar 82,4% artinya ada kenaikan sebesar kurang lebih 3 % dibandingkan dari 3 (tiga) tahun terakhir

Tabel. 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Angka Harapan Hidup Masyarakat		Angka Harapan Hidup	73,5
		1. Meningkatkan Status Kesehatan dan gizi Ibu dan anak	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	168/100.000 KH
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	11/1000KH
			Persentase Balita stunting	29,1
		2. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pelayanan PTM	90%
			Cakupan Pelayanan Penyakit Menular	90%
		3. meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana	Prevalensi KB Aktif Moderen	74,84
			Total Fertility Rate	2,21
2	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Predikat SAKIP	B
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan mutu fasyankes dasar dan rujukan		Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM, Sarana dan Prasarana	75
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan Dasar	85

			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan Rujukan	78
--	--	--	---	----

### 3.2 Program dan Kegiatan

#### 1. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan juga menjadi salah satu pertimbangan. Program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu harus meningkatkan capaian indikator SPM terhadap target yang telah ditetapkan.
- b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama bagi penduduk miskin melalui kebijakan :
  - Peningkatan pemenuhan upaya kesehatan perseorangan dan masyarakat (Sapras, Pelayanan, informasi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular)
  - Peningkatan Kapasitas sumberdaya manusia kesehatan
  - Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting dan gizi
- d. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta SDM kesehatan
- e. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat
- f. Ketersediaan obat, mutu obat, vaksin, alat kesehatan dan makanan minuman
- g. Promotif dan Prenventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
- h. Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).

## 2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan program sebagai berikut :

### **Sasaran 1 : Meningkatnya Status Kesehatan dan gizi Ibu dan anak**

Capaian Kinerja sasaran *Meningkatnya Status Kesehatan dan gizi Ibu dan anak*” penurunan AKI, AKB, dan Balita Stunting di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 3 Program yaitu :

#### **a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Kegiatan :

##### 1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Pengelolaan Kesehatan Lingkungan
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

#### **b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Kegiatan :

##### 1) Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

2) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

**c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

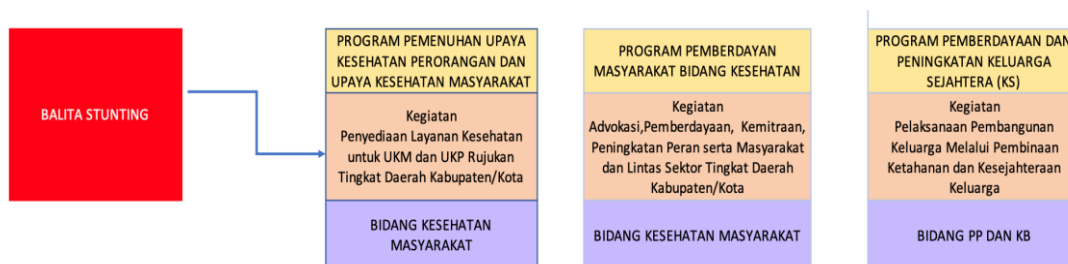
Kegiatan :

1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub kegiatan :

- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Gambar 3.1  
*Cross Cutting Balita Stunting*



**Sasaran 2 : Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular**

Capaian Kinerja sasaran “**Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular**” di arahkan pada upaya Meningkatkan Cakupan Pelayanan Penyakit Tidak Menular dan Cakupan pelayanan Penyakit Menular di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu

secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 Program yaitu :

**a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Kegiatan :

1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

**Sasaran 3: Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana**

Capaian sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana diarahkan pada upaya peningkatan Prevalensi KB Aktif dan pengendalian *Total Fertility Rate (TFR)*. Sasaran ini didukung oleh 3 Program :

**a. Program pengendalian penduduk**

Kegiatan :

- 1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengezndalian Kuantitas Penduduk

Sub kegiatan :

- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
- Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

- 2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
- Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
- Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

***b. Program pembinaan keluarga berencana (KB)***

**Kegiatan :**

- 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub kegiatan :

- Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK



- Pengendalian Program KKBPK
- 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
  - Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
  - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
  - Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
  - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  - Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
  - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
  - Pembinaan Terpadu Kampung KB

***c. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)***

**Kegiatan :**

- 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan :

- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

#### **Sasaran 4 Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan RB dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Capaian sasaran kinerja Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan RB dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diarahkan pada upaya meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran ini didukung oleh 1 Program yaitu :

- ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***

Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***

Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

**Sasaran 2 : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan**

Capaian Kinerja sasaran “**Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan**” di arahkan pada upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 4 Program yaitu :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan :

1) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan

- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

2) Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub kegiatan :

- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

**b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Kegiatan :

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
- Pembangunan Puskesmas
- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan Obat, Vaksin
- Pengadaan Bahan Habis Pakai
- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

**2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit
- Operasional Pelayanan Puskesmas
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

3) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

**c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Kegiatan

1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**

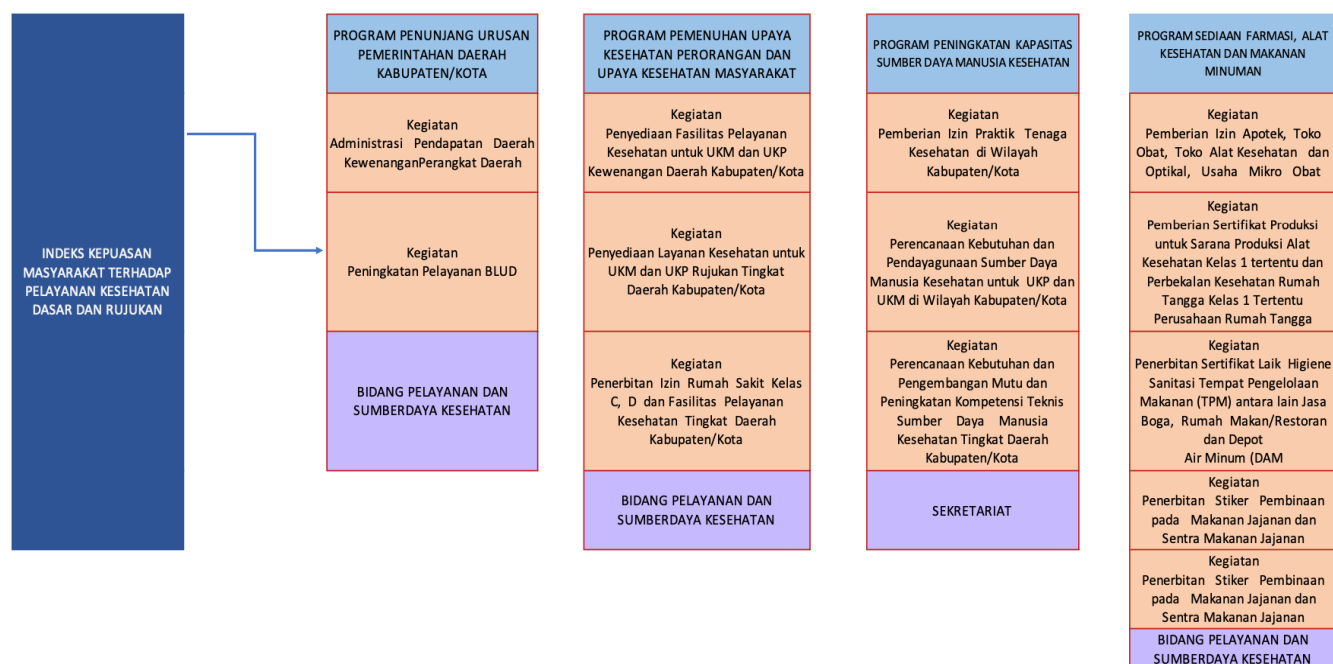
Kegiatan

1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
  - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- Sub Kegiatan
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- 3) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- Sub Kegiatan
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- 4) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

**Gambar 3.2**  
**Crosscutting Indeks Kepuasan Masyarakat**  
 Untuk lebih jelasnya mengenai indikator pendanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 yang termuat pada lampiran.





No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	4	16
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			227,445,402,491.00				207,079,588,610.
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			215,807,035,041.00				195,492,140,375.
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			215,807,035,041.00				195,492,140,375.
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	150,964,975,635.00			Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	148,480,627,886.
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase target kinerja yang di evaluasi	100%	313,683,000.00			Persentase target kinerja yang di evaluasi	696,099,690.00
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	86,158,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	220,227,260.00
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							

			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	26,387,500.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	37,068,350.00
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	3 Dokumen	13,800,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	25,182,520.00
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	19,212,500.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</i>	38,599,000.00

								Dokumen Perubah an DPA- SKPD	
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6 Laporan	53,300,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	89,110,450.00
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	114,825,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	285,912,110.00

	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu</i>	100 %	109,580,640,945.00			<i>Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu</i>	109,580,640,945.00
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	946 Orang/bulan	107,670,095,594.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	107,670,095,594.00
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	223,714,480.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	223,714,480.00
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	1,275,231,100.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian</i>	1,275,231,100.00

						Kel/Desa	SI UMUM	n/Verifikasi Keuangan SKPD	
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	9 Dokumen	23,007,666.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	23,007,666.00
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	55,661,089.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	55,661,089.00
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	1 Dokumen	10,458,998.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak</i>	10,458,998.00

								Lanjut Pemeriks aan	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	14 Laporan	322,472,018.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	Jumlah Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulan a n/Semest eran SKPD	322,472,018.00
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik daerah pada perangkat daerah	100%	142,300,000.00			Persenta se Pemenuh an Administ rasi Barang Milik daerah pada perangka t daerah	168,634,000.00
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							

			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	75,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	75,000,000.00
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Laporan	41,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	75,000,000.00
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	7 Laporan	25,800,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	18,634,000.00
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Pendapatan daerah kewenangan</i>	100%	4,423,842,757.00			<i>Persentase pemenuhan Administrasi</i>	5,068,986,493.00

		Daerah	<i>perangkat daerah</i>					<i>asi Pendapat an daerah kewenan gan perangka t daerah</i>	
	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah							
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	25 Dokumen	4,423,842,757.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelol aan Retribusi Daerah</i>	5,068,986,493.00
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %	216,662,600.00			<i>Persenta se Pemenuh an Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah</i>	0.00
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	6,050,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Pendataa n dan Pengolah an Administ rasi Kepegaw aian</i>	0.00
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							



			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	210,612,600.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	0.00
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	1,750.937.175,000			<i>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</i>	0.00
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	266,004,300.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	0.00
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	170,159,275.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	0.00

	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	3 Dokumen	111,840,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	0.00
	1.02.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	31,169,600.00	-	-	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	0.00
	1.02.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2 Laporan	1,089,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	0.00
	1.02.0101.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	82,764,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip</i>	0.00

						n, Semua Kel/Desa	ALOKA SI UMUM	Dinamis pada SKPD	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	207,000,000.00			<i>Persenta se pemenuh an Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah</i>	0.00
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan	207,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	<i>Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediak an</i>	0.00
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	3 Unit	1,103,072,747.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANS FER KHUSU S- DANA ALOKA SI KHUSU S FISIK	<i>Jumlah Unit Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n yang Disediak an</i>	0.00
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	2,119,528,253.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0.00
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	1,000,470,000.00			<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1,337,655,000.00
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	30 Unit	828,520,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan</i>	1,071,455,000.00

								Perizinan nya	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	200 Unit	171,950,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	266,200,000.00
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	31,628,611,758.00			-	31,628,611,758.00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	100% Unit Kerja	31,628,611,758.00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN YAK BIDANG KESEHATAN	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	31,628,611,758.00
2.	1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<i>Rasio daya tamping rumah sakit rujukan kabupaten</i>	<b>80%</b>	<b>41,888,991,746.00</b>			<i>Rasio daya tamping rumah sakit rujukan kabupaten</i>	<b>46,790,030,489.00</b>

	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alkes > 60% dan ketersediaan obat 143 item obat di IFK	90%	12,311,696,138.00			Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alkes > 60% dan ketersediaan obat 143 item obat di IFK	4,950,000,000.00
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya							
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	4,652,265,189.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0.00
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya							

			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun</i>	5 Unit	485,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun</i>	0.00
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							
			<i>Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun</i>	4 Unit	230,800,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun</i>	0.00
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</i>	5 Unit	430,800,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA	<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM</i>	0.00

							ALOKA SI KHUSU S FISIK	agar Sesuai Standar	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit							
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit</i>	1 Unit	200,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	<i>Jumlah Sarana, Prasaran a dan Alat Kesehata n yang Telah Dilakuka n Program Rehabilit asi dan Pemeliha raan Oleh Rumah Sakit</i>	0.00
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas							
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas</i>	2 Unit	253,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	<i>Jumlah Sarana, Prasaran a dan Alat Kesehata n yang Telah Dilakuka n Rehabilit asi dan Pemeliha</i>	0.00



								raan Oleh Puskesmas	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit	297,800,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0.00
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	4 Unit	300,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0.00

	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>	90% Unit	336,398,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-LOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>	0.00
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>	80% Unit	70,984,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>	0.00
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	454 Paket	3,618,159,169.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-LOKASI	<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis</i>	4,500,000,000.00

							UMUM	Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)							
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	0 Layanan	1,045,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	0.00
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan							

			<i>Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>	250 Paket	391,489,780.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>	450,000,000.00
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i>	100%	28,103,641,608.00			<i>Persentase peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i>	41,505,570,205.00
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	5201 Orang	44,165,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	46,373,250.00
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							

			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	4964 Orang	1,777,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	1,858,500.00
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
			<i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	4728 Orang	94,418,400.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	<i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	11,193,000.00
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	22713 Orang	21,920,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	23,016,000.00

	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	40878 Orang	36,518,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	38,343,900.00
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	168067 Orang	125,660,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	131,943,000.00
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
			<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	26889 Orang	35,560,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	37,338,000.00

1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68136 Orang	51,650,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54,232,500.00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3047 Orang	443,727,900.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	465,914,295.00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3201 Orang	736,434,400.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	773,256,120.00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								

			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>	8792 Orang	209,680,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANS FER KHUSU S- DANA ALOKA SI KHUSU S NON FISIK	<i>Jumlah Orang Terduga Menderit a HIV yang Mendapa tkan Pelayana n Sesuai Standar</i>	220,164,000.00
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar</i>	23 Dokumen	74,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelol aan Pelayana n Kesehata n bagi Pendudu k Terdamp ak Krisis Kesehata n Akibat Bencana dan/atau Berpoten si Bencana Sesuai Standar</i>	94,000,000.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							



			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	15 Dokumen	6,832,268,300.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	225,155,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	23 Dokumen	65,340,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	65,340,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	23 Dokumen	1,783,100,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	1,783,100,000.00

							FER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	an	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>	5 Dokumen	473,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>	143,850,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	23 Dokumen	1,107,700,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	1,163,085,000.00
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA							
			<i>Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>	203 Orang	54,830,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI	<i>Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan</i>	57,571,500.00

							SI KHUSUS NON FISIK	Pelayanan Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	23 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	70,000,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23 Dokumen	5,481,294,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5,755,358,700.00

							FISIK		
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	23 Dokumen	0.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	7,245,030,240.00
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional							
			<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>	50 Paket	182,100,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>	191,205,000.00
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit							

			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>	3 Dokumen	2,650,000,008.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>	2,850,000,000.00
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	23 Dokumen	5,845,298,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	18,323,331,400.00
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							

			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota</i>	26 Unit	909,985,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-LOKASI UMUM	<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota</i>	909,985,000.00
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>	23 Laporan	77,297,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>	81,161,850.00
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	593 Orang	241,650,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	253,732,500.00
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							

			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	40 Orang	50,590,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	53,119,500.00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>	15 Orang	82,739,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>	86,875,950.00
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>	12 Dokumen	240,939,600.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>	210,036,000.00
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik							

			<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	26 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	140,000,000.00
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<i>Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</i>	100%	466,850,000.00			<i>Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</i>	242,460,284.00
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	1 Dokumen	466,850,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	242,460,284.00
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,006,804,000.00			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan	92,000,000.00



		Kabupaten/Kota						n Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar</i>	0 Unit	220,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKA SPPK UMUM	<i>Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar</i>	0.00
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan</i>	0 Unit	714,804,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKA SPPK UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKA	<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan</i>	0.00

							SI KHUSUS NON FISIK	n	
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	3 Dokumen	72,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	92,000,000.00
3.	1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b><i>Persentase tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik</i></b>	-	22,204,187,460.00			<b><i>Persentase tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik</i></b>	0.00
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pemberian izin praktik tenaga kesehatan</i>	100 %	28,875,000.00			<i>Persentase pemberian izin praktik tenaga kesehatan</i>	0.00
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	1 Dokumen	28,875,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	0.00
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	22,175,312,460.00			-	0.00
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>	12 Orang	21,912,002,160.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	0.00

								<i>n</i> (Fasyankes)	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	23 Dokumen	263,310,300.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	0.00
4.	1.02.04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b><i>Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat</i></b>	80%	70,380,200.00			<b><i>Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat</i></b>	63,982,000.00
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<i>Pemberian rekomendasi izin apotek, toko obat, toko alat Kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT)</i>	100 %	22,451,000.00			<i>Pemberian rekomendasi izin apotek, toko obat, toko alat Kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT)</i>	20,410,000.00

	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	20 Dokumen	22,451,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	20,410,000.00
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	<i>Persentase pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	100%	17,160,000.00			<i>Persentase pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk</i>	15,600,000.00

		Tangga						Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Dokumen	17,160,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi	15,600,000.00

								si oleh Industri Rumah Tangga	
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100%	30,769,200.00			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	27,972,000.00
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	30,769,200.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan	27,972,000.00

								n Pemeriks aan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawa san	
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T BIDANG KESEHATAN	<i>Persentase Kecamatan dengan Rumah tangga ber PHBS &gt; 50 %</i>	55 %	678,500,000.00			<i>Persenta se Kecamat an dengan Rumah tangga ber PHBS &gt; 50 %</i>	157,500,000.00
	1.02.05.2.03	Pengembanga n dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	<i>Persentase puskesmas yang melaksanakan Germas pada kelompok masyarakat diwilah kerja minimal 2 klaster</i>	20 %	678,500,000.00			<i>Persenta se puskesm as yang melaksan akan Germas pada kelompok masyara kat diwilah kerja minimal 2 klaster</i>	157,500,000.00
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							



			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	3 Dokumen	678,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	157,500,000.00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10,116,593,850.00				11,587,448,235.00
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			10,116,593,850.00				11,587,448,235.00
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific kelahiran per fertility Rate / ASFR 15-19</i>	50	802,962,050.00			<i>Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific kelahiran per fertility Rate / ASFR 15-19</i>	883,258,255.00

	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Jumlah dokumen pengendalian kuantitas penduduk yang selaras</i>		67,650,000.00			<i>Jumlah dokumen pengendalian kuantitas penduduk yang selaras</i>	74,415,000.00	
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota</i>	12 Dokumen	46,420,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota</i>	51,062,000.00	
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal								
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan</i>	3 Satuan Pendidikan	21,230,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi</i>	23,353,000.00	

			<i>Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</i>					<i>si dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</i>	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk kabupaten</i>		735,312,050.00			<i>Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk kabupaten</i>	808,843,255.00
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga							
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</i>	12 Laporan	68,436,500.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi</i>	75,280,150.00

								Keluarga	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga							
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	228,360,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	251,196,000.00
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	278,300,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	306,130,000.00
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain							
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	10 Unit	102,104,200.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana	112,314,620.00

								(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana							
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	12 Laporan	58,111,350.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	63,922,485.00
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance rate/m CPR)	82,1	5,615,203,000.00			Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance rate/m CPR)	6,635,918,300.00

	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase advokasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal		1,660,450,000.00			Persentase advokasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	2,285,690,000.00
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK							
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	6 Laporan	154,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	169,400,000.00
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana							
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	796,950,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	876,645,000.00

								Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	379,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB -BOKB	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	876,645,000.00

	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							
			<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	1 Dokumen	110,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB -BOKB	<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	121,000,000.00
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
			<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>	2 Organisasi	220,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB -BOKB	<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,</i>	242,000,000.00



								dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase kecamatan yang memiliki tenaga PKB dan PLKB minimal 1	15 kecamatan	2,029,319,600.00			Persentase kecamatan yang memiliki tenaga PKB dan PLKB minimal 1	2,232,251,560.00
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)							
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	846 Orang	930,600,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,023,660,000.00
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)							

			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	1,098,719,600.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1,208,591,560.00
--	--	--	---	------------	------------------	---	--------------------------------------	---	------------------

	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Faskes yang mendapat distribusi alat dan obat kontrasepsi</i>	100 %	1,196,873,700.00			<i>Persentase Faskes yang mendapat distribusi alat dan obat kontrasepsi</i>	1,316,561,070.00
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	32 Laporan	17,600,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	19,360,000.00
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	667 Orang	241,853,700.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB -BOKB	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	266,039,070.00
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB							
			<i>Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	23 Unit	916,080,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB -BOKB	<i>Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	1,007,688,000.00
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	12 Laporan	21,340,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB -BOKB	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk</i>	23,474,000.00

								Jaringan dan Jejaringnya	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	20 %	728,559,700.00			Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	801,415,670.00
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 Organisasi	153,864,700.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya	169,251,170.00

								dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB							
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	4,125,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4,537,500.00
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB							
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	3 Laporan	65,120,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	71,632,000.00
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas							
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	39 Kampung	505,450,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan	555,995,000.00

								Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pengembangan pelayanan informasi dan konseling PIKR, BKR, BKL dan UPPKS UPPKA		3,698,428,800.00			Cakupan pengembangan pelayanan informasi dan konseling PIKR, BKR, BKL dan UPPKS UPPKA	4,068,271,680.00
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	427,468,800.00			Persentase Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	470,215,680.00
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							

			<i>Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)</i>	8 Laporan / Dokumen	31,680,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB -BOKB	<i>Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)</i>	34,848,000.00
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							
			<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>	25 Unit	330,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB -BOKB	<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>	363,000,000.00



	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)</i>	6 Laporan	65,788,800.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<i>Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)</i>	72,367,680.00
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	3,270,960,000.00			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan	3,598,056,000.00

								Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	472 laporan	1,557,600,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1,713,360,000.00
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1416 laporan	1,713,360,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,	1,884,696,000.00

								Pasca salin/kela hiran, Baduta/B alita) yang mendapa t pendamp ingan	
TOTAL					227,445,402,491.00	TOTAL		207,079,588,610.00	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan 8 (delapan) Program yang akan dilaksanakan agar Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program tersebut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
5. Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan
6. Program pengendalian penduduk
7. Program pembinaan keluarga berencana (KB)
8. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seluruh aparatur secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025.
4. Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.